



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 135 TAHUN 2018  
TENTANG  
ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan sinergi pembangunan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi daerah, perlu adanya *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pati;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang salah satunya adalah *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Roadmap* Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan...

8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROADMAP* PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan...

5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.
6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDA adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah.
8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat SIDA Kabupaten Pati adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Pati.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pati untuk periode 5 (lima) tahun.

11. Rencana...

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Pati adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk periode 1 (satu) tahun.
12. *Road Map* Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah salah satu dokumen yang menjabarkan secara lebih detail arah pembangunan daerah dalam hal pengembangan potensi-potensi lokal dengan mengutamakan penumbuhkembangan inovasi oleh institusi-institusi pemerintah daerah baik secara sektoral maupun lintas sektor, oleh lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha serta masyarakat di daerah.

## BAB II

### ROADMAP PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Susunan Roadmap Penguatan SIDa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. kondisi SIDa saat ini;
  - b. tantangan dan peluang SIDa;
  - c. kondisi SIDa yang akan dicapai;
  - d. strategi dan arah kebijakan penguatan SIDa;
  - e. fokus dan program prioritas SIDa;
  - f. rencana aksi penguatan SIDa.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI PATI,  
Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,  
Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 135

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
SITI SUBIATI, SH MM  
Pembina  
NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PATI  
NOMOR 135 TAHUN 2018  
TENTANG  
ROADMAP PENGUATAN SISTEM  
INOVASI DAERAH  
KABUPATEN PATI TAHUN 2018 -  
2022

**BAB 1**  
**KONDISI SIDA SAAT INI**

**1.1 Latar belakang**

Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) adalah salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi, merupakan agenda nasional sesuai dengan amanah UU Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan UU Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Peningkatan daya saing antar daerah merupakan agenda yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengembangkan daya saing daerah perlu identifikasi potensi sumber daya daerah atau produk- produk unggulan yang potensial yang dapat dikembangkan dalam suatu wilayah dengan memanfaatkan ketersediaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat, agar memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga tercipta keunggulan kompetitif yang siap menghadapi persaingan global.

Oleh karena itu, sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah yang mensyaratkan kapabilitas inovasi, penetapan potensi sumber daya, produk-produk barang/jasa potensial yang akan dikembangkan dalam penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pati sangat diperlukan agar SIDa yang dibangun dan dikembangkan dapat lebih fokus dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pati. Kapabilitas inovasi tersebut merupakan kemampuan daerah dalam mengimplementasi

agenda-agenda strategis pada penguatan SIDA secara terarah dan berkelanjutan dengan komitmen tinggi.

Agenda strategis tersebut meliputi kebijakan penguatan SIDA, penataan unsur-unsur SIDA dan pengembangan SIDA. Kepala daerah menetapkan kebijakan penguatan SIDA yang tercantum dalam bentuk *roadmap* (peta jalan) penguatan SIDA yang diintegrasikan ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Kabupaten Pati yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, memerlukan proses percepatan pembangunan ekonomi, agar dapat memenuhi kesejahteraan masyarakatnya serta memiliki daya saing yang unggul dari daerah lainnya. Hal tersebut, mendorong Kabupaten pati mensinergikan berbagai macam praktek penyelenggaraan Pemerintah daerah yang Inovatif dalam mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Dengan demikian, penyusunan Roadmap Penguatan SIDA menjadi langkah strategis dan penting bagi Pemerintah Kabupaten Pati.

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan suatu bentuk cara pandang/pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, inovatif, holistik dan berkelanjutan, dengan lebih menekankan kerja kolaboratif antar aktor inovasi di daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Sistem Inovasi Daerah (SIDa) juga dapat dikatakan sebagai suatu kesatuan dari sehimpunan pelaku pembangunan, kelembagaan (termasuk kebijakan), serta hubungan interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan invensi, difusi, dan inovasi, termasuk teknologi, dan praktek baik/terbaik serta proses pembelajarannya di Kabupaten Pati.

Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati akan mencerminkan 6 (enam) agenda kebijakan inovasi dalam bentuk indikator – indikator yang berkesuaian. Pilar Prakarsa implementasinya terdiri atas Penguatan Sistem Inovasi daerah, penguatan Klaster Industri, Penguatan Jaringan Inovasi, Penguatan Teknopreneur dan pengembangan Tematik Daerah akan mengerucut ke dalam serangkaian Kelitbangan / Inovasi daerah dengan mengarahkan pada Bidang Fokus penguatan SIDA Kabupaten Pati tahun 2018-2022, yaitu “PENGEMBANGAN AGROBISNIS DAN PARIWISATA”.

## 1.2 Gambaran Umum Daerah

### a. Kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Saat Ini .

Ruang Lingkup penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati saat ini meliputi 3 aspek penting yaitu :

- 1) Kebijakan penguatan Sistem Inovasi Daerah
- 2) Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah
- 3) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

a) Kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) meliputi :

- Pembentukan tim koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati dengan keputusan Bupati Pati Nomor : 050/508 tahun 2017
- Pembentukan Sekretariat Tim Koordinasi Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati dengan keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Pati Nomor 050/046 tahun 2017
- Penyusunan Peraturan Bupati Pati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati.

b) Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah

Penataan unsur Sistem Inovasi Daerah dilaksanakan melalui :

- Penataan Kelembagaan/ Organisasi

Yang meliputi Institusi pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Kelitbangan, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penunjang Inovasi, Dunia Usaha dan, Organisasi Kemasyarakatan. OPD merupakan kelembagaan pemerintah mempunyai beberapa potensi untuk menjadi dasar bagi pembangunan sistem inovasi daerah. Beberapa OPD yang terlibat dalam pengembangan Inovasi Daerah adalah Dinas Parporabud, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, dan Bappeda. Kabupaten Pati juga memiliki kelembagaan Dewan riset Daerah (DRD) yang memiliki peran dalam memberikan masukan kepada Bupati tentang prioritas iptek di daerah sehingga lembaga ini sangat penting dalam pengembangan SIDa.

- Penataan Peraturan Perundang-undangan

Yang dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisivitas bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati dengan melakukan pengkajian isu-isu strategis yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, mengubah dan atau mendapat peraturan perundang-undangan daerah terkait penguatan SIDa Kabupaten Pati. Kabupaten Pati

memiliki kelengkapan yang cukup untuk mengembangkan Sistem Inovasi daerah walaupun tentu saja kemanfaatannya masih memiliki kekurangan karena belum memiliki legitimasi hukum. Dari hasil FGD menunjukkan bahwa sektor UMKM, agrobisnis dan pariwisata memiliki performa yang perlu ditingkatkan pada kurun waktu 4 tahun mendatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM pertanian dan pariwisata sebagai sektor prioritas yang akan dikembangkan melalui Sistem Inovasi Daerah.

- Penataan Norma/Etika /Budaya

Yang dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasi nilai-nilai sosial bagi penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati.

c) Penataan jaringan Sistem Inovasi Daerah

Dilaksanakan melalui Komunikasi Interaktif antara lembaga/organisasi SIDA, mobilisasi Sumber Daya Manusia dan optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, Sarana&Prasarana ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi Interaktif antar lembaga/ Organisasi Dilaksanakan melalui kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenis, menjalin kerjasama kelitbangan antar Lembaga/Organisasi SIDA, kerjasama keahlian dan ketrampilan Sumber Daya Manusia untuk Penguatan SIDA antar kabupaten/ kota, antar perangkat daerah dan antara lembaga pemerintah dan non lembaga pemerintah. Mobilisasi Sumber Daya Manusia Dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/ atau ketrampilan Sumber Daya Manusia untuk Penguatan SIDA Kabupaten Pati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana&prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui : pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual, Pemanfaatan Informasi SIDA dan Pemanfaatan Sarana Prasarana SIDA. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian sangat strategis. Hal ini tersebut telah terbukti dengan kemampuannya dalam mengakomodasi tenaga kerja khususnya pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia tahun 1997/1998. UMKM telah dapat menjadi tumpuan dalam menampung tenaga kerja yang tergeser karena banyak pemutusan hubungan kerja dari perusahaan yang tutup usaha.

Kendati demikian penting peranya, namun hingga saat ini UMKM menghadapi berbagai permasalahan antara lain yaitu daya saing yang masih

sangat rendah, permodalan yang sangat terbatas , teknologi yang sebagian besar masih tertinggal, akses informasi dan komunikasi sangat kurang, serta kreativitas dan kemampuan untuk bersaing pada tataran lebih tinggi masih sangat lemah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan kebijakan dan program pemerintah yang benar-benar menyentuh akar permasalahan yang dihadapi UMKM. Kelompok UMKM merupakan kelompok terbesar dari total unit usaha yang ada di Pati. Kelompok UMKM memainkan peran yang tidak kecil dalam penyediaan lapangan kerja secara nasional. Selain kebijakan UMKM perlu mengembangkan jaringan untuk memperkuat dan memajukan daya saing melalui penerapan dan pemanfaatan Iptek di Daerah. IPTEK di daerah harus dikemas dalam sebuah skema yang inovatif, bertujuan untuk memperkuat UMKM melalui introduksi ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), serta penyediaan dana awal secara terbatas dikelola secara berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan dimaksudkan agar usaha tersebut dapat memiliki efek ganda (multiplier effect) dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh kegiatan IPTEK di daerah. Jaringan SIDA harus dibangun dalam konteks kerjasama yang berguna bagi pengembangan UMKM dan industri kreatif.

d) Penataan Sumber Daya Sistem Inovasi Daerah

Meliputi pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/ atau spesifikasi sumber daya SIDA, pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pemanfaatan data dan informasi, pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Pati dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Pati.

e) Pengembangan Sistem Inovasi Daerah

Yaitu meliputi Pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah, pemetaan potensi dan analisis SIDA dan pemberlanjutan penguatan SIDA, pengembangan SIDA dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwaju dan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah, yang meliputi :

- Pengembangan komitmen dan konsensus Unsur-unsur SIDA di Kabupaten Pati dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, sumber daya SIDA

- Penataan potensi dan analisis SIDA dilakukan melalui identifikasi dan pengumpulan data, pemetaan, analisis factor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan.
- Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Pati dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali

**Tabel I.1**

**Kondisi SIDA Saat ini**

<b>No</b>	<b>Kerangka Kebijakan Inovasi</b>	<b>Kondisi Saat ini</b>
(1)	(2)	(3)
1	Elemen 1 : Kerangka Umum yang kondusif bagi Inovasi dan Bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan sistem inovasi dalam perencanaan pembangunan daerah.</li> <li>• Belum terdapat kajian kebijakan penanaman modal yang komperhensif.</li> </ul>
2	Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN) atau penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) serta kemampuan obsorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum sinerginya antara lembaga dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)</li> </ul>
3	Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT.</li> </ul>
4	Elemen 4 : Budaya Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terbinanya kreatifitas dan inovasi teknologi masyarakat.</li> </ul>

5	Elemen 5 : Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi daerah	• Belum terdapatnya dokumen rencana aksi penguatan inovasi tahunan.
6	Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	• Kurangnya kajian penelitian.

**Tabel I.2**

**Kondisi Klaster Industri**

<b>No.</b>	<b>Kerangka Kebijakan Inovasi</b>	<b>Kondisi Saat ini (2017)</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Elemen 1 : Kerangka Umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.</li> <li>• Belum adanya Materplan Industri Perdagangan</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.</li> <li>• Belum optimalnya promosi dan kerjasama investasi</li> </ul>
2.	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan masalah keamanan pangan.</li> <li>• Belum optimalnya pengembangan jangkauan pemasaran industri</li> <li>• Belum terwujudnya daya saing yang handal</li> </ul>
3.	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya jaringan bisnis pemasaran global</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya keikutsertaan dalam forum kemitraan perdagangan luar negeri</li> <li>• Belum terdapatnya sistem informasi database bidang kebudayaan</li> </ul>
4.	Elemen 4: Budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berkembangnya kebudayaan dan pariwisata lokal kabupaten</li> <li>• Belum terkelolanya karya cetak dan karya rekam kekayaan budaya.</li> </ul>
5.	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah</li> </ul>
6.	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya kegiatan promosi perdagangan internasional dan regional</li> </ul>

**Tabel I.3**

**Kondisi Jaringan Inovasi**

<b>No.</b>	<b>Kerangka Kebijakan Inovasi</b>	<b>Kondisi Saat ini (2017)</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Elemen 1 : Kerangka Umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya interkonektivitas kepariwisataan yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur terminal wisata</li> <li>• Belum memadainya ketersediaan infrastruktur komunikasi dengan kebutuhan pengembangannya.</li> </ul>
2.	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pemeliharaan jaringan komunikasi dan informasi.</li> <li>• Belum kuatnya database pelayanan sebagai landasan pengambilan kebijakan</li> <li>• Belum optimalnya kegiatan</li> </ul>

	serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
3.	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya fasilitas dalam pengembangan kerjasama antar daerah</li> </ul>
4.	Elemen 4: Budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penerapan Iptekin dalam menunjang berbagai aktivitas masyarakat.</li> <li>• Perlunya pengembangan aparatur sesuai dengan kompetisi dan prestasi</li> </ul>
5.	Elemen 5: Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum komprehensifnya data sistem angkutan guna mendukung konektivitas fisik antar daerah di kabupaten</li> </ul>
6.	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum meratanya konektivitas sosial secara nasional dalam distribusi Iptekin</li> </ul>

**Tabel I.4**

**Kondisi Teknopreneur**

<b>No.</b>	<b>Kerangka Kebijakan Inovasi</b>	<b>Kondisi Saat ini (2017)</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Elemen 1 : Kerangka Umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya kualitas SDM usaha perdagangan luar negeri.</li> </ul>
2.	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/ atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlatihnya masyarakat petani mengenai penerapan teknologi pertanian/perkebunan modern.</li> </ul>

	serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	
3.	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terlatihnya petani mengenai teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.</li> </ul>
4.	Elemen 4: Budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan agribisnis peternakan</li> </ul>
5.	Elemen 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengembangan dan pelayanan teknologi industri.</li> </ul>
6.	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kegiatan penyuluhan guna meningkatkan produksi pertanian/perkebunan</li> </ul>

**Tabel I.5**

**Kondisi *Electronic Government***

<b>No.</b>	<b>Kerangka Kebijakan Inovasi</b>	<b>Kondisi Saat ini (2017)</b>
(1)	(2)	(3)
1.	Elemen 1 : Kerangka Umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya perencanaan arah pengembangan e-gov</li> <li>• Belum utuhnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk.</li> </ul>
2.	Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan pengelolaan sistem informasi keungan daerah. Belum terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan.</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan sumberdata komunikasi dan informasi dalam LPSE</li> <li>• Belum optimalnya pengelolaan data</li> </ul>

	mikro, kecil dan menengah (UMKM)	<p>jasa postel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.</li> <li>• Belum optimalnya Pengembangan Database Kependudukan.</li> </ul>
3.	Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan kapasitas manajemen bidang komunikasi dan informasi.</li> </ul>
4.	Elemen 4: Budaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya aparatur yang belum menguasai TI</li> <li>• Belum meratanya kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>• Perlunya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa.</li> </ul>
5.	Elemen 5: Keterpaduan/koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum semua SKPD Kabupaten memiliki website.</li> <li>• Belum terwujudnya keterpaduan/koherensi dalam pendaftaran kependudukan.</li> </ul>
6.	Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih belum meratanya informasi pembangunan di masyarakat.</li> </ul>

### **b. Aspek Geografis dan Wilayah**

Kabupaten Pati secara administratif terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian Timur Laut. Kota Pati Juwana, dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang). Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sedangkan untuk rencana pola ruang Provinsi Jawa Tengah, wilayah Kabupaten merupakan salah satu kawasan lindung geologi berupa kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo meliputi wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo. Untuk kawasan budidaya, wilayah Kabupaten Pati diarahkan untuk pengembangan

hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan

**Gambar I.1**

**Peta Kedudukan Kabupaten Pati dalam Kancah Regional  
Provinsi Jawa Tengah**



*Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.*

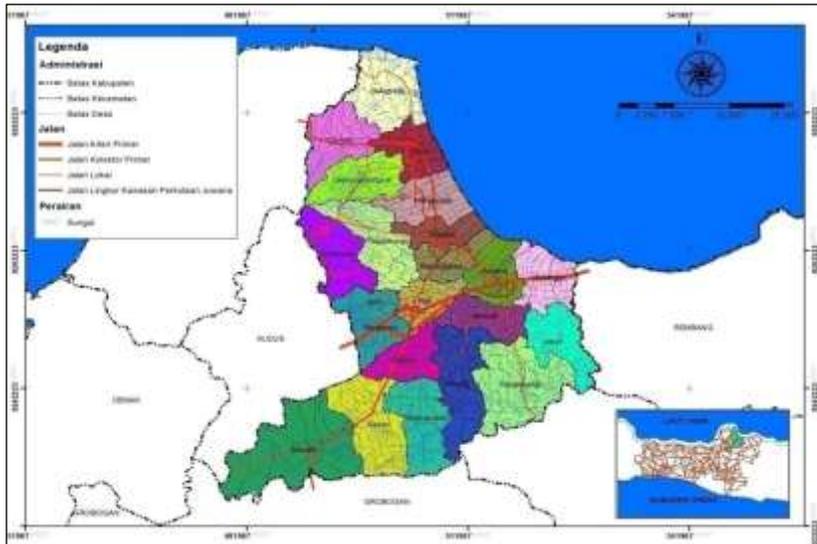
1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi.

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km<sup>2</sup>) dengan batas wilayah administratif sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Rembang;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Blora;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Jepara.

Secara administratif terbagi atas 21 kecamatan sebagaimana digambarkan dalam peta berikut ini:

**Gambar I.2**  
**Peta Administratif Kecamatan Di Kabupaten Pati**



*Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.*

Gambaran mengenai luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I.6**  
**Luas Kecamatan di Kabupaten Pati**

<b>No.</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Desa/ Kelurahan</b>	<b>Luas / Area (km<sup>2</sup>)</b>	<b>Persentase (%)</b>
1	Sukolilo	16	158,74	10,56
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	3,53
10	Pati	24/5	42,49	2,83
11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,30	4,48

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas / Area (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85
17	Margoyoso	22	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	15	61,80	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43
TOTAL		406	1.503,68	100,00

*Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka, 2016.*

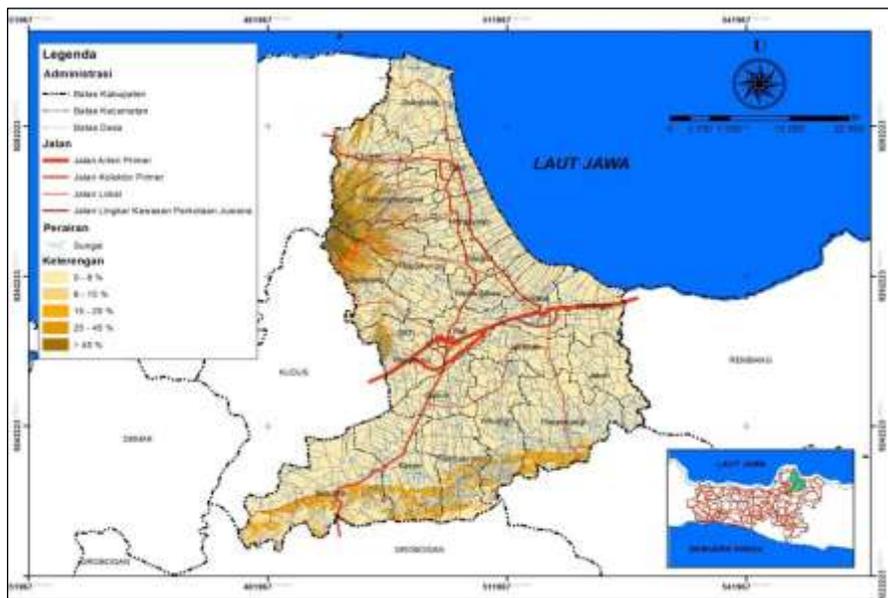
## 2) Letak dan Kondisi Geografis.

Secara astronomis, Kabupaten Pati terletak antara 6°25' - 7°00' Lintang Selatan dan antara 100°50'-111°15' Bujur Timur. Gambaran kekhasan posisi Kabupaten Pati yang berpotensi memberikan keuntungan komparatif yaitu posisi Pati yang berada di jalur Pantura yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap.

## 3) Topografi

Secara topografi wilayah Kabupaten Pati terdiri dari tiga relief daratan yaitu: lereng Gunung Muria, membentang sebelah barat bagian Utara; daratan rendah, membujur di tengah sampai Utara; serta pegunungan kapur yang membujur di sebelah Selatan. Kabupaten Pati memiliki variasi ketinggian antara 2-624 mdpl, daerah terendah adalah Kecamatan Gabus antara 2-8 mdpl, sedangkan daerah tertinggi adalah kecamatan Tlogowungu antara 38-624 mdpl yang merupakan wilayah lereng Gunung Muria.

**Gambar I.3**  
**Peta Topografi Kabupaten Pati**



*Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030*

Wilayah Kabupaten Pati didominasi oleh daerah dataran rendah dengan kemiringan antara 0-5<sup>0</sup> yang berada di wilayah Kecamatan Tayu, Wedarijaksa, Jaken, Kayen, Pucakwangi, Tambakromo, Sukolilo, Dukuhseti, Trangkil, Pati, Juwana, Batangan, Margorejo, Gabus, Winong, Margoyoso dan Jakenan.

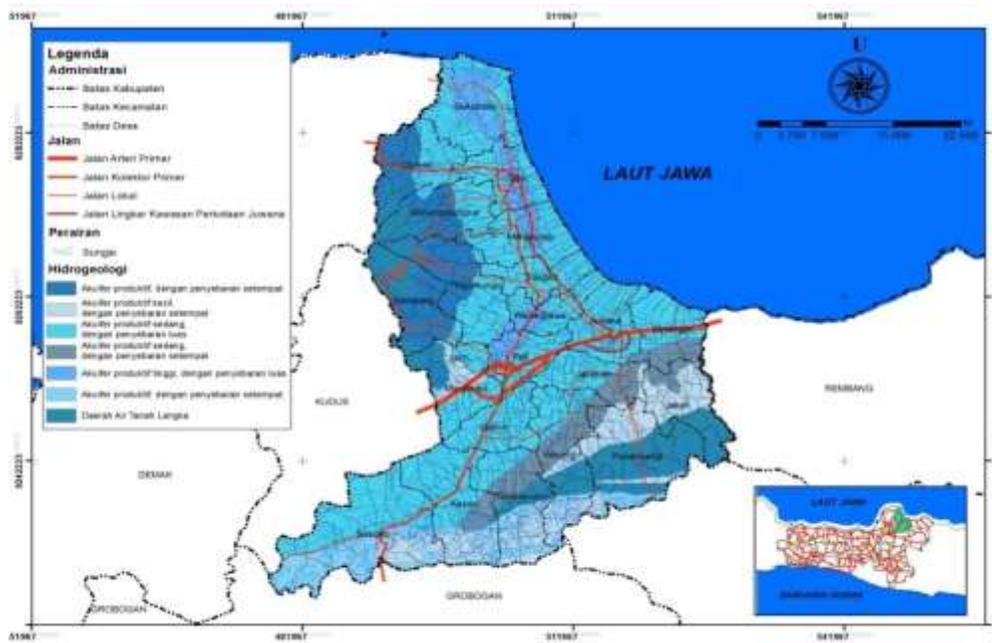
#### 4) Geologi

Kondisi geologi Kabupaten Pati ditandai dengan adanya wilayah perbukitan dan dataran rendah. Daerah perbukitan secara geologi disusun oleh batuan sedimen klasik, sedimen gunung api dan intrusi batuan andesit. Sedangkan untuk daerah dataran rendah berupa alluvium yang terdiri dari kerakal, kerikil, pasir lanau dan lempung.

#### 5) Hidrologi

Ketersediaan sumber air di Kabupaten Pati cukup besar didukung keberadaan sungai yang tersebar di seluruh wilayah. Sungai di Kabupaten Pati pada umumnya berfungsi dalam pengairan atau irigasi. Namun demikian, pada musim kemarau kebanyakan dari sungai-sungai yang ada mengalami kekeringan. Sedangkan pada musim penghujan, beberapa sungai justru meluap.

**Gambar I.4**  
**Peta Hidrogeologi Kabupaten Pati**



*Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.*

Aquifer produktif tersebar di sebagian besar Kecamatan Gembong, Tlogowungu, dan Gunungwungkal serta sebagian kecil Kecamatan Cluwak. Adapun aquifer produktif tinggi yang sudah dimanfaatkan tersebar di sebagian Kecamatan Pati, Wedarijaksa, Margoyoso, dan Dukuhseti.

### **c. Potensi Pengembangan Wilayah**

Potensi wilayah di Kabupaten Pati sebagaimana disebut dalam Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya dan kawasan lindung.

#### 1) Pengembangan kawasan budidaya

##### a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi dibagi menjadi hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap.

##### b) Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan pertanian ditujukan untuk pertanian lahan basah (sawah) dan hortikultura.

##### c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan meliputi kecamatan: Margorejo, Gembong, Margoyoso, Gunungwungkal, Cluwak, dan Dukuhseti.

##### d) Kawasan Peruntukan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan terdiri atas: perikanan tangkap, perikanan budidaya tambak, perikanan budidaya air tawar, dan pengolahan ikan.

e) Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi:

- Potensi bahan tambang besi di Kecamatan Dukuhseti dan Kecamatan Tayu.
- Potensi bahan tambang fosfat di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- Potensi bahan tambang kalsit di Kecamatan Kayen
- Potensi bahan tambang batu gamping untuk semen di Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Tambakromo.
- Potensi bahan tambang tras di Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Cluwak.
- Potensi bahan tambang sirtu di Kecamatan Cluwak, Kecamatan Tayu, Kecamatan Gunungwungkal, Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu dan Kecamatan Winong.

f) Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri dari industri besar, menengah, kecil dan industri rumah tangga.

- Pengembangan industri besar dan menengah, industri manufaktur berlokasi di Kecamatan Margorejo dan Kecamatan Pati.
- Industri manufaktur dan perikanan yang berlokasi di Kecamatan Batangan dan Kecamatan Juwana.
- Industri agro dan pertambangan yang berlokasi di Kecamatan Tayu, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Tambakromo, Kecamatan Kayen, dan Kecamatan Sukolilo.
- Pengembangan industri kecil dan rumah tangga dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Pati.

g) Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata meliputi pariwisata alam, pariwisata budaya, pariwisata religi, dan pariwisata buatan.

h) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Pati, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di

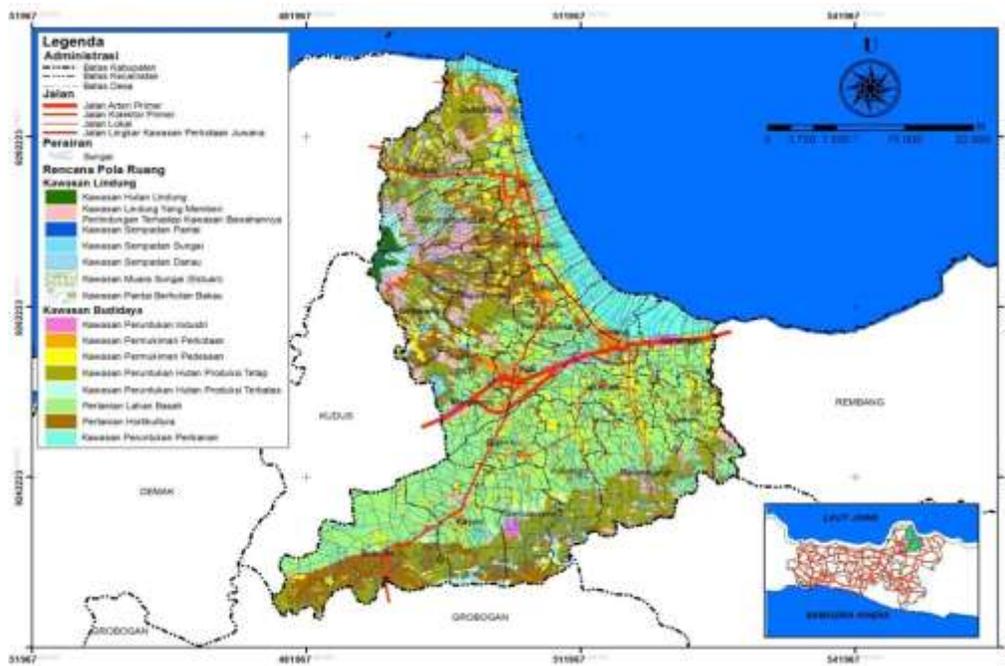
masing-masing kecamatan yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

## 2) Pengembangan Kawasan Lindung

Pengembangan kawasan lindung diarahkan untuk pengelolaan kawasan lindung tanpa mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam.

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pati ditampilkan pada gambar berikut:

**Gambar I.5**  
**Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pati**



Sumber: Dokumen RTRW Kab. Pati 2010-2030.

### d. Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Pati merupakan salah satu Kabupaten dengan risiko tinggi terhadap bencana. Berdasarkan data IRBI 2013, indeks risiko bencana Kabupaten Pati sebesar 174 dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Pati 2014, terdapat beberapa potensi bencana di Kabupaten Pati yaitu, banjir, tanah longsor, kekeringan, angin puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Adapun persebaran potensi bencana berdasarkan wilayah adalah sebagai berikut:

- 1) Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pati,  
Potensi bencana banjir di Kabupaten Pati secara umum tinggi karena tersebar hampir di tiap kecamatan di Kabupaten Pati terutama yang berada di sepanjang pesisir pantai diantaranya Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Wedarijaksa, Trangkil, Margoyoso, dan Batangan, serta kecamatan yang dilalui Sungai Juwana diantaranya, Kecamatan Jakenan, Juwana, Pati, Winong, Tambakromo, Margorejo, Gabus, Kayen, dan Sukolilo.
- 2) Kawasan rawan bencana tanah longsor,  
Ancaman bencana longsor di Kabupaten Pati secara umum terdapat di dua area yaitu area Utara yang berada di lereng Gunung Muria di antaranya Kecamatan Gunungwungkal, Cluwak, Tlogowungu dan Gembong, serta area Selatan yang terdapat pada perbatasan Selatan Kabupaten Pati dengan kabupaten lain diantaranya Kecamatan Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, Jaken, dan Pucakwangi.
- 3) Kawasan rawan kekeringan di Kabupaten Pati  
Wilayah dengan ancaman bencana kekeringan meliputi beberapa wilayah di sisi Selatan yaitu, di sebagian Kecamatan Kayen, Jaken, dan Gabus.
- 4) Kawasan rawan angin puting beliung di Kabupaten Pati meliputi:  
Wilayah dengan status risiko tinggi tersebar di wilayah Selatan terutama di Kecamatan Tambakromo Kecamatan Kayen, Gabus, Jakenan, dan Sukolilo.
- 5) Kawasan rawan gempa di Kabupaten Pati  
Beberapa wilayah di Kabupaten Pati dilewati oleh patahan, sehingga berpotensi mengalami bencana gempa bumi, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, Pati, Gabus, Margorejo, Kayen, dan Sukolilo.
- 6) Kawasan rawan bencana gelombang pasang  
Kawasan rawan bencana gelombang pasang terdapat di sepanjang pesisir pantai, meliputi Kecamatan Dukuhseti Kecamatan Tayu, Margoyoso, Trangkil, Wedarijaksa, Juwana, dan Batangan.

Gambaran peristiwa bencana alam dan wabah penyakit serta perkiraan kerugian yang ditimbulkan di Kabupaten Pati selama periode Tahun 2012-2016 ditampilkan berikut.

### 1.3.Kondisi Demografi

Berdasarkan proyeksi BPS Kabupaten Pati, jumlah penduduk pada tengah tahun 2016 sebanyak 1.239.989 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 825 jiwa/km<sup>2</sup>. Semakin tinggi kepadatan penduduk mengindikasikan tingkat kerapatan penggunaan lahan untuk kawasan terbangun, sehingga beban lingkungan hidup juga semakin tinggi. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel I.7**  
**Kepadatan Penduduk di Kabupaten Pati**  
**Tahun 2011-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Penduduk (jiwa)</b>	<b>Kepadatan Penduduk (jiwa / km<sup>2</sup>)</b>
2012	1.207.399	803
2013	1.218.016	810
2014	1.225.594	815
2015	1.232.889	820
2016*	1.239.989	825

*Sumber: BPS Kabupaten Pati 2011-2016*

Perbandingan kepadatan penduduk kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan Kabupaten Pati memiliki kepadatan penduduk relatif rendah. Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka Tahun 2017, kepadatan penduduk Kabupaten Pati (825 jiwa/km<sup>2</sup>) menempati urutan ke-8 kepadatan penduduk terendah dari 29 kabupaten lainnya, setelah Kabupaten Blora (475), Wonogiri (521), Rembang (611), Grobogan (684), Purworejo (686), Wonosobo (789), dan Cilacap (792).

Sex Ratio penduduk Kabupaten Pati Tahun 2016 sebesar 93,97, artinya setiap 100 perempuan dalam suatu kawasan di Kabupaten Pati, akan terdapat pula sebanyak 94 pria di dalamnya sehingga bisa dikatakan cukup seimbang. Gambaran jumlah penduduk Kabupaten Pati berdasarkan jenis kelamin periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel I.8**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat Pertumbuhan**  
**Penduduk Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Jenis Kelamin	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016*
Laki-Laki	586.531	590.181	593.810	597.314	600,723
Perempuan	620.529	627.835	631.784	635.598	639,266
Jumlah Total	1.207.060	1.218.016	1.225.594	1.232.912	1.239.989
Laju Pertumbuhan (%)	0,71	0,91	0,62	0,60	0,57

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017

Berdasarkan Jawa Tengah dalam Angka tahun 2017, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati menempati urutan ke-14 diantara 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 2012-2016, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pati cenderung menurun.

**Tabel I.9**  
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Pati Tahun**  
**2012-2016**

Tahun	Penduduk Usia Kerja / Tenaga Kerja (orang)	Angkatan Kerja (orang)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)
2012	903.167	640.664	70,94
2013	901.182	641.599	71,20
2014	942.338	649.323	68,91
2015	952.195	645.912	67,83
2016*	961.925	654.631	68,05

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017. (Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan penurunan angkatan kerja. Penurunan drastis tingkat pengangguran terjadi di tahun 2013. Hal ini dikarenakan survey di tahun 2012 dilakukan berdekatan dengan hari raya, sehingga penduduk usia kerja yang merantau ke luar wilayah Kabupaten Pati berada di rumah dan meningkatkan persentase pengangguran.

**Tabel I.10**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Mencari Kerja (pengangguran) (orang)</b>	<b>Angkatan Kerja (orang)</b>	<b>Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)</b>
2012	78.177	640.664	12,20
2013	46.863	641.599	7,30
2014	41.390	649.323	6,37
2015	28.613	645.912	4,43
2016*	26.979	654.631	4,12

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2013 – 2016 dan Disnaker Kab. Pati 2017.(Catatan: 2016\* data diolah Pusdatin Kemnaker RI).*

#### **1.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Upaya kesejahteraan memerlukan sinergi antar sektor ekonomi strategis sehingga tercipta stabilitas ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menghasilkan SDM yang potensial dan produktif. Keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat berdasarkan peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), rendahnya pengangguran, dan turunnya Tingkat Kemiskinan Masyarakat.

Pengembangan dan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pati Tahun 2012–2016 sebagaimana dalam table 1.11 dan perkembangan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pati Tahun 2012 – 2016 sebagaimana dalam table 1.12

**Tabel I.11**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

Lapangan Usaha		2012		2013		2014		2015*		2016**	
		Rp (Miliar)	Pert. (%)								
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.678,00	5,41	5.902,45	3,95	5.833,74	-1,16	6.281,19	7,67	6.531,66	3,99
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	4.824,09	5,62	4.986,43	3,37	4.858,43	-2,57	5.247,18	8,00	5.441,85	3,71
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	85,95	0,43	86,76	0,93	89,77	3,47	88,69	-1,20	87,46	-1,38
3	Perikanan	767,96	4,70	829,26	7,98	885,55	6,79	945,32	6,75	1.002,35	6,03
B	Pertambangan dan Penggalian	378,09	7,75	405,31	7,2	430,8	6,29	441,03	2,38	461,02	4,53
C	Industri Pengolahan	5.520,58	7,19	5.984,88	8,41	6.380,18	6,6	6.680,75	4,71	6.991,05	4,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,16	9,9	24,15	9,17	26,46	9,35	27,33	3,29	28,67	4,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,86	-1,75	14,64	-1,47	15,36	4,89	15,63	1,76	16,23	3,84

F	Konstruksi	1.647,92	6,66	1.739,01	5,53	1.813,76	4,3	1.908,07	5,2	2.012,25	5,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.178,82	1,9	3.287,46	4,05	3.500,93	5,85	3.658,74	4,51	3.843,15	5,04
H	Transportasi dan Pergudangan	586,05	7,37	642,67	9,68	706,54	9,92	761,83	7,83	816,95	7,24
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	719	8,08	760,94	5,83	817,59	7,45	879,85	7,62	952,05	8,21
J	Informasi dan Komunikasi	445,75	9,82	22	9,24	583,47	19,8	640,89	9,84	702,54	9,62
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	521,22	3,04	546,76	4,9	566,83	3,67	601,84	6,18	644,14	7,03
L	Real Estate	227,77	4,97	242,82	6,61	258,94	6,64	276,72	6,87	295,12	6,65
M,N	Jasa Perusahaan	40,58	8,27	45,43	11,94	49,16	8,22	53,25	8,32	58,31	9,51
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	785,39	1,31	805,32	2,54	817,15	1,47	858,77	5,09	895,35	4,26
P	Jasa Pendidikan	751,9	18,58	825,9	9,84	913,56	10,6	983,64	7,67	1.054,75	7,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,5	8,33	190,04	7,06	210,41	10,7	226,28	7,54	246,57	8,97
R,S,T,U	Jasa Lainnya	376,73	6,02	404,87	7,47	440,34	8,76	456,54	3,68	490,14	7,36
PDRB Total		21.072,32	5,93	22.329,69	5,97	23.365,21	4,64	24.752,33	5,94	26.039,96	5,2

Sumber: BPS KabupatenPati 2017

**Tabel I.12**  
**Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pati**  
**Tahun 2012-2016**

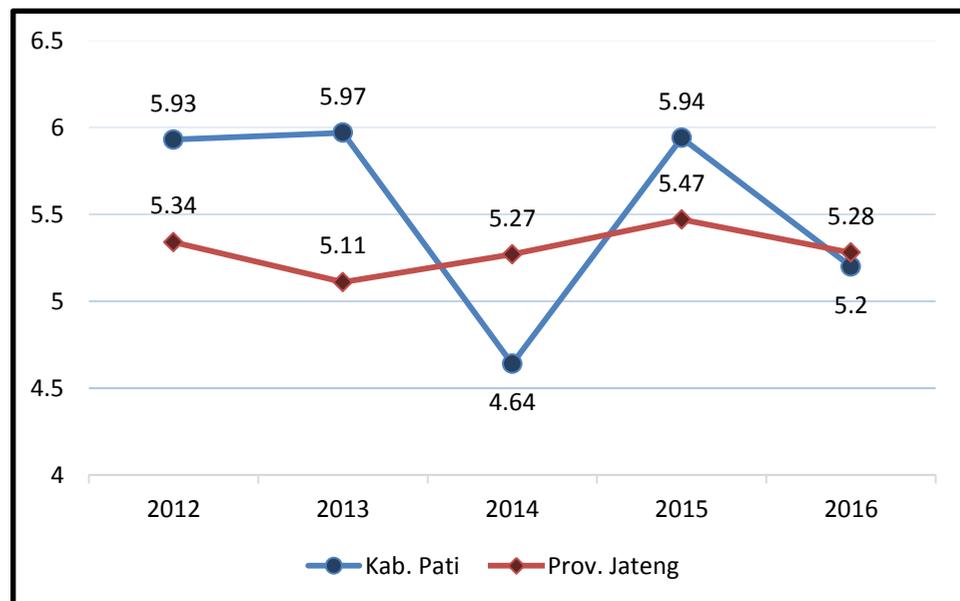
LAPANGAN USAHA		2012		2013		2014		2015*		2016**	
		Rp (jt)	Pert (%)								
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.470.381	12,20	7.124.440	10,11	7.486.269	5,08	8.454.569	12,93	8.978.290	6,19
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	5.512.661	13,03	6.023.824	9,27	6.240.205	3,59	7.092.543	13,66	7.497.680	5,71
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	94,143	1,12	102,957	9,36	117,123	13,76	121,546	3,78	122,361	0,67
3	Perikanan	863,577	8,40	997,659	15,53	1.128.941	13,16	1.240.481	9,88	1.358.248	9,49
B	Pertambangan dan Penggalian	408,655	11,33	457,856	12,04	542,625	18,51	602,451	11,03	649,606	7,83
C	Industri Pengolahan	6.182.885	12,80	7.029.437	13,69	7.871.692	11,98	8.431.400	7,11	9.096.699	7,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	22,883	11,61	24,234	5,90	27,039	11,58	29,135	7,75	31,912	9,53
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah	14,998	-1,68	15,086	0,59	15,908	5,45	17,02	6,99	17,937	5,39
F	Konstruksi	1.771.626	9,48	1.931.976	9,05	2.157.142	11,65	2.362.219	9,51	2.533.627	7,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.414.408	3,63	3.695.913	8,24	4.034.969	9,17	4.333.538	7,40	4.664.663	7,64
H	Transportasi dan Pergudangan	589,568	7,76	653,423	10,82	766,105	17,26	863,075	12,66	926,3	7,33
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	782,525	11,91	872,249	11,47	967,003	10,86	1.056.412	9,25	1.195.970	13,21
J	Informasi dan Komunikasi	438,48	7,37	471,773	7,59	560,925	18,90	612,918	9,27	674,157	9,99
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	585,071	11,88	638,054	9,06	688,506	7,91	757,256	9,99	835,234	10,30

L	Real Estate	233,822	5,60	253,891	8,58	286,247	12,74	316,782	10,67	349,149	10,22
M,N	Jasa Perusahaan	44,709	11,71	52,336	17,06	58,878	12,50	65,016	10,42	73,263	12,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	870,614	10,25	951,85	9,33	1.024.708	7,65	1.110.128	8,34	1.188.846	7,09
P	Jasa Pendidikan	922,064	29,19	1.075.213	16,61	1.226.825	14,10	1.366.893	11,42	1.496.127	9,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	202,529	15,91	232,505	14,80	269,45	15,89	296,783	10,14	326,61	10,05
R,S,T, U	Jasa Lainnya	404,819	10,27	451,215	11,46	520,568	15,37	548,854	5,43	608,218	10,82
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		23.325.038	10,98	25.931.378	11,01	28.504.862	9,92	31.224.449	9,54	33.646.610	7,76

Sumber: BPS Kabupaten Pati 2013-2017

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan bahwa Tahun 2012 sebesar 5,93 meningkat menjadi 5,97 di tahun 2013, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan drastis menjadi 4,64. Hal ini disebabkan karena terjadinya bencana banjir besar dan tanah longsor di 18 kecamatan yang menyebabkan lapangan usaha khususnya pertanian mengalami pertumbuhan negatif. Kemudian pada tahun 2015 mengalami kenaikan normal kembali ke angka 5,94 dan di tahun 2016 menurun kembali ke angka 5,2. Pertumbuhan tahun 2016 ini mendekati pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,28. Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

**Gambar I.6**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Pati**  
**dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah**



Sumber: Olah data PDRB Kabupaten Pati, 2016.

#### 1. Laju Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa. Namun demikian, inflasi yang terlalu rendah mengakibatkan investor enggan berinvestasi. Tingkat inflasi di Kabupaten Pati Tahun 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel I.13**  
**Tingkat Inflasi KabupatenPati Tahun 2012-2016**

No	Tahun	Inflasi	
		Pati	Jateng
1	2012	3,92	4,24
2	2013	7,57	7,99
3	2014	8,01	8,22
4	2015	3,23	2,73
5	2016	2,31	2,36

*Sumber: BPS KabupatenPati, 2013-2017.*

Secara umum inflasi di KabupatenPati masih lebih rendah dibanding inflasi di Jawa Tengah, kecuali di tahun 2015. Di tahun 2014, Kabupaten Pati mengalami peningkatan inflasi. Hal ini dikarenakan beberapa faktor, seperti kenaikan harga BBM, bencana alam, dan tarif listrik sehingga meningkatkan harga-harga kebutuhan.

## 2. Penduduk Miskin

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Kabupaten Pati. Salah satu parameter untuk mengukur kemiskinan adalah Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin Kabupaten Pati periode 2012-2016 ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel I.14**  
**Gambaran Kemiskinan di KabupatenPati**  
**Tahun2012-2016**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2012	288.271	13,61
2	2013	314.609	12,94
3	2014	332.228	12,06
4	2015	347.575	11,95
5	2016	377.442	11,65

*Sumber: BPS KabupatenPati, 2012-2016*

Permasalahan dalam pengukuran kemiskinan adalah belum tersedianya basis data yang terintegrasi sehingga upaya penanggulangan kemiskinan masih bersifat parsial. Selain itu, belum terjadi pemerataan pembangunan yang dibuktikan dengan masih tingginya persentase desa sangat tertinggal dan tertinggal (53,11%). Permasalahan kemiskinan juga berkaitan dengan kualitas SDM, dimana rata-rata lama sekolah masih

rendah (6,83) di tahun 2016. Kesenjangan gender masih terjadi dimana angka melahirkan perempuan usia 15-19 tahun masih 30%. Kerentanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga mempengaruhi kinerja penurunan kemiskinan, sebagaimana ditunjukkan di tahun 2014. Pada tahun tersebut terjadi bencana banjir hampir di seluruh wilayah yang mengakibatkan penurunan kemiskinan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun lain.

### **1.5 Aspek Daya Saing Daerah**

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan. Penjelasan indikator variabel aspek daya saing daerah sebagai berikut:

#### **a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Daya saing Kabupaten Pati utamanya kemampuan ekonomi berkaitan dengan posisi strategis yang berada di jalur Pantura. Selain itu Kabupaten Pati juga memiliki garis pantai sepanjang ±60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya. Namun demikian, kerentanan terhadap bencana, terutama banjir, tanah longsor, dan kekeringan dapat menurunkan daya saing daerah.

Pengembangan wilayah Kabupaten Pati juga diarahkan untuk pengembangan pertanian, peternakan, perkebunan, industri, permukiman, dan pariwisata. Berkaitan dengan pengembangan wilayah, untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Pati diantaranya melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD). Berdasarkan data kontribusi PDRB sektoral, sektor industri manufaktur dan sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan dalam komposisi PDRB Kabupaten Pati yang di dalamnya terdapat beberapa jenis produk unggulan daerah.

Indikator kemampuan ekonomi daerah sebagaimana ditunjukkan di atas adalah dari aspek produksi. Aspek yang lain adalah pengeluaran rata-rata penduduk. Pengeluaran rata-rata perkapita pertahun adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk. Perkembangan pengeluaran perkapita Kabupaten Pati tahun 2012-2016 dapat dilihat

pada tabel berikut:

**Tabel I.15**  
**Tabel Perbandingan Indeks Gini, Konsumsi Nonmakanan, LPE**  
**dan Pengeluaran Perkapita Riil KabupatenPati**  
**Tahun 2012-2016**

<b>Tahun</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)</b>	<b>Gini Rasio</b>	<b>Pengeluaran Perkapita Riil (Rp. 000)</b>	<b>Konsumsi Non Makanan (%)</b>	<b>Konsumsi Makanan (%)</b>
2012	5,93	0,29	8.997.000	47.16	52.84
2013	5,97	0,30	9.088.000	46.22	53.78
2014	4,64	0,31	9.106.000	48.59	51.41
2015	5,94	0,35	9.380.000	54.43	45.57
2016	5,20	n.a	9.548.000	48.04	51.96

*Sumber: BPS Kabupaten Pati 2017*

Kemampuan ekonomi daerah dapat direpresentasikan melalui rata – rata pertumbuhan produktivitas total daerah yang tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi. Tingkat pemerataan pendapatan direpresentasikan melalui indeks gini. Semakin tinggi indeks gini berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat masih menyisakan permasalahan berupa distribusi pendapatan yang belum merata.

Pengeluaran perkapita riil masyarakat KabupatenPati sejak tahun 2012-2016 menunjukkan tren yang meningkat. Proporsi konsumsi nonpangan menunjukkan nilai 20-49% sehingga apabila didasarkan dari teori di atas, dapat digolongkan ke dalam kondisi rumah tangga yang sedang. Hal tersebut mengindikasikan kesiapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kegiatan produktif. Selanjutnya diperlukan inisiatif pemerintah untuk mendorong munculnya usaha produktif.

#### **b. Fokus Fasilitas Wilayah dan Infrastruktur**

Posisi Kota Pati, Juwana dan Tayu dalam perencanaan pengembangan wilayah (struktur ruang) Provinsi Jawa Tengah ditetapkan sebagai daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Rencana pengembangan struktur ruang wilayah KabupatenPati meliputi rencana sistem perkotaan (Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pengembangan Kawasan, dan Pusat Kegiatan Lingkungan) dan rencana sistem jaringan prasarana wilayah. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah Kabupaten Pati meliputi rencana sistem prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Ketersediaan sarana prasarana wilayah yang didukung dengan infrastruktur yang memadai baik kualitas dan kuantitasnya serta persebarannya yang merata akan menumbuhkan daya tarik dan daya saing daerah menguatkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif Kabupaten Pati.

#### 1) Fasilitas Perhubungan

Kabupaten Pati memiliki kondisi jalan berkualitas baik sebesar 58%, panjang jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 74,68% untuk konektivitas antarwilayah. Sarana perhubungan di Kabupaten Pati belum memadai. Tersedia 271 buah angkutan umum yang melayani sepanjang jaringan jalan kabupaten. Kabupaten Pati memiliki terminal bis tipe C sebanyak 3 buah. Data tahun 2016 sebanyak 3.159.725 orang melewati terminal Pati.

#### 2) Fasilitas Penunjang

Salah satu unsur penunjang pembangunan adalah adanya jasa peristirahatan dan hiburan. Fasilitas hotel berperan sebagai variabel yang menunjang perkembangan perekonomian di Kabupaten Pati. Hotel ini akan memfasilitasi pengunjung dari luar kota yang akan melakukan kegiatan bisnis, wisata, dan lain-lain. Tahun 2016 di Kabupaten Pati telah tersedia hotel berbintang, *homestay*, dan restoran yang menyediakan beragam kuliner. Selain itu, Kabupaten Pati juga ditunjang dengan tersedianya objek wisata alam, religi, dan buatan.

#### 3) Air Bersih

Ketersediaan air bersih berperan sangat penting bagi daya tarik bisnis atau pelancong yang akan masuk ke suatu daerah. Tahun 2016 sebanyak 27.559 KK menggunakan layanan air PDAM. Kondisi kawasan kumuh tahun 2016 masih teridentifikasi 0,935%, dengan kondisi rumah tidak layak huni 33.278 unit. Kondisi ini menjadi tantangan bagi daya saing Kabupaten Pati. Sedangkan untuk rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak, tahun 2016 mencapai angka 71%.

Berdasarkan gambaran ketersediaan sarana dan prasarana wilayah, Kabupaten Pati perlu memprioritaskan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing.

### **c. Iklim Investasi**

Iklim investasi tidak dapat dipisahkan dari kondusivitas lingkungan yang memberi ketenangan berinvestasi. Kemudahan

perizinan dan pemerintahan yang bersih menjadi daya tarik bagi calon investor. Demikian juga kondisi tenteram, tidak terganggu dengan kasus-kasus kriminal akan membantu daya tarik daerah dan berkontribusi pada daya saing daerah.

#### **d. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang termasuk dalam usia produktif (15-64 tahun) yang bekerja di Kabupaten Pati pada tahun 2015 paling banyak adalah lulusan SD ke bawah. Gambaran penduduk usia kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Pati periode 2012-2015 ditampilkan tabel berikut.

**Tabel I.16**  
**Jumlah Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Pati Tahun 2012-2015**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	SD ke bawah	300.606	303.173	314.108	328.702
2	SMP	106.611	118.671	117.380	117.032
3	SMA	112.467	127.644	129.856	122.610
4	D I/II/III dan Universitas	42.803	45.248	46.589	48.955
Jumlah		562.487	594.736	607.933	617.299

*Sumber : BPS KabupatenPati, 2013-2016.*

### **1.6 Analisis Gambaran Umum Daerah**

Amanat pembangunan daerah yang dimandatkan oleh Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 258 yaitu: (i) Peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat; (ii) kesempatan kerja; (iii) lapangan berusaha; (iv) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik; (v) daya saing daerah.

Kondisi umum daerah kabupaten Pati dari aspek geografi dan demografi memberikan kekuatan dan juga memiliki kelemahan untuk memenuhi mandat pasal 258 tersebut di atas. Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), difungsikan sebagai kawasan lindung geologi berupa Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo, diarahkan untuk pengembangan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan rakyat, serta lahan pertanian pangan berkelanjutan. Posisi ini berimplikasi Kabupaten Pati harus menjaga dinamika pembangunan daerahnya untuk mengamankan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan kata lain isu pembangunan

hijau (*green development*) menjadi isu strategis yang perlu dikawal dalam program dan kegiatan pembangunan selanjutnya.

Berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Pati memiliki garis pantai yang cukup panjang, kurang lebih 60 km, sehingga potensial untuk pengembangan perikanan tangkap dan budidaya memberikan keuntungan komparatif untuk membangun daya saing wilayah. Demikian halnya dengan potensi pengembangan wilayah untuk budidaya pertanian dan perkebunan memberikan tantangan isu penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk penguatan ekonomi berperspektif keberlanjutan lingkungan (*green economy*). Keberlanjutan lingkungan hidup sangat penting bagi kabupaten Pati karena basis utama kekuatan ekonominya bergantung pada alam.

Secara demografi, struktur penduduk Kabupaten Pati lapangan pekerjaan utama Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan disusul oleh Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel. Di era kemajuan teknologi informasi, atau era revolusi industri generasi keempat memberi tantangan sekaligus ancaman bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk membangun ekonomi berbasis teknologi industri. Aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek daya saing daerah yang menjadi mandat Undang-undang nomor 23 tahun 2014 memerlukan aksi pelayanan publik yang handal dari para ASN birokrasi yang profesional dan berintegritas. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah menjadi barometer kualitas sumber daya manusia di birokrasi Pemerintah Kabupaten Pati.

Aspek penyelenggaraan pelayanan umum lebih diukur pada keluaran outcome program. Jika dikaitkan dengan belum tercapainya kinerja sasaran aspek kesejahteraan umum maka hal ini menunjukkan hal yang sangat krusial. Sasaran pembangunan yang belum tercapai terutama yang mewakili komponen kemampuan ekonomi, yaitu partisipasi angkatan kerja, pengangguran, kemiskinan. Data ini menandakan program dan kegiatan yang dipilih pada aspek penyelenggaraan urusan pemerintahan belum tepat berorientasi pada sasaran utama pembangunan daerah. Oleh karena itu di RPJMD periode 2017-2022 perlu optimalisasi tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel

Dari kesimpulan analisis ini, secara garis besar isu strategis pembangunan pemerintah Kabupaten Pati yang perlu diprioritaskan dalam RPJMD 2017-2022 adalah:

- 1) Isu sarana prasarana wilayah dan Kerjasama antar daerah;
- 2) Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- 3) Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- 4) Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah;
- 5) Isu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;

## **BAB II**

### **TANTANGAN DAN PELUANG SIDA**

#### **2.1 Isu Strategis Daerah**

##### **a. Isu Sarana Prasarana Wilayah dan Kerjasama Antar Wilayah**

Pengembangan kawasan strategis yang berdaya saing juga memerlukan konektivitas antar wilayah, termasuk konektivitas antar kecamatan cukup baik dan telah didukung dengan trayek kendaraan umum. Tantangan isu strategis lain untuk mendukung pengembangan Kabupaten Pati sebagai kawasan strategis MP3EI adalah pemenuhan kebutuhan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dengan kuantitas dan kualitas yang cukup sesuai kebutuhan.

Kabupaten Pati sebagai bagian dan pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Wanarakuti, dialokasikan 2 (dua) kawasan inti, yaitu: (1) Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Margorejo dan (ii) Pelabuhan Perikanan Juwana. Implikasinya pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pati yaitu: (i) peningkatan status jalan Jepara-Juwana menjadi jalan provinsi; (ii) melanjutkan pembangunan kolam tambat kapal; (iii) pengembangan turap dermaga; (iv) pengadaan angkutan umum Kudus- Pati.

Kabupaten Pati dalam lima tahun terakhir memiliki kecenderungan proporsi anggaran untuk pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan pada APBD, maupun DAK lebih besar dibanding kegiatan lainnya. Kabupaten Pati telah memiliki Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif. Dalam RPJMN buku III, di Kabupaten Pati juga direncanakan Pembangunan Bendung Karet Tondomulyo.

Isu strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah terdiri dari isu kedua yaitu daya dukung sarana prasarana wilayah untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Perincian secara lebih detail terkait dengan isu strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ketersediaan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar wilayah : transportasi, sanitasi, jalan, jembatan, irigasi;
- 2) Infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi;
- 3) Isu penataan ruang pendukung pertumbuhan wilayah;
- 4) Isu pemenuhan universal access 100-0-100;

5) Isu sarana publik yang sehat;

6) Isu penyediaan perumahan;

Isu infrastruktur dan pengembangan wilayah diakomodir dalam misi Bupati melalui misi ke tujuh yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.

#### **b. Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana**

Lingkungan hidup yang sehat menjadi isu strategis menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan dan analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Berikut ini adalah isu-isu yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan terkait lingkungan hidup berkelanjutan.

Kondisi topografi dan geologi, sebagian besar wilayah Pati merupakan daerah rawan bencana sehingga bencana hampir terjadi setiap tahun. Pola hidup masyarakat yang tidak peduli terhadap pengurangan risiko bencana yang ditandai dengan besarnya kerugian akibat bencana menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana masih rendah.

Penurunan kualitas sumberdaya air diakibatkan oleh pencemaran dan aktivitas penduduk yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Diantaranya buangan limbah industri dan domestik yang belum terolah dengan baik. Penurunan kuantitas sumberdaya air disebabkan karena berkurangnya kawasan tangkapan air. Hal ini terkait alih fungsi lahan, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Terjadinya alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun juga akan berakibat pada peningkatan emisi karbon yang akan meningkatkan kerawanan bencana iklim, yang berdampak pada anomali cuaca.

Secara ringkas isu keberlanjutan lingkungan hidup terkait dengan dampak perubahan iklim yang berisiko pada kejadian bencana alam, Fokus isu lingkungan mencakup: (i) Isu kelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran; (ii) Isu peningkatan lingkungan permukiman dan sanitasi sehat.

Isu Lingkungan hidup direspon dengan misi ke delapan yaitu Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

#### **c. Isu Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial**

Isu pemerintahan bidang sosial budaya diakomodir melalui misi pertama Bupati terpilih 2017-2022 “Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai

budaya dan kearifan lokal; misi ke dua Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan’, dan misi ke tiga ‘Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan”.

Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pati masuk kategori sedang, yaitu rangking 20 dari 35 kab/kota dengan skor 69,03 pada tahun 2016. Fokus isu peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah pemenuhan hak ekonomi sosial budaya:(termasuk pendidikan, kesehatan, pangan) sebagai pilar kesejahteraan rakyat.

Isu kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari hal penurunan pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memenangkan persaingan pasar tenaga kerja. Semakin banyak yang terserap di lapangan kerja maka pertumbuhan pendapatan akan meningkatkan modal perluasan kesejahteraan.

Di sisi lain pemerintah daerah dapat melancarkan reformasi pelayanan publik. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan. Fokus isu bidang kesehatan.: (i) sinergitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta; (ii) partisipasi masyarakat berperilaku hidup sehat untuk menurunkan risiko angka kesakitan dan kematian; (iii) peningkatan kepemilikan jaminan kesehatan di masyarakat.

Aspek kesejahteraan sosial juga mencakup penguatan kapasitas individu, keluarga, rumah tangga, dan kelompok masyarakat untuk mampu mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada kondisi tertentu diperlukan kebijakan jaring pengaman untuk kelompok rentan supaya tidak mengalami peminggiran dan lebih terpuruk dalam ketidaksejahteraan, Oleh karena itu isu kesejahteraan selanjutnya adalah Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan, Kelompok rentan dapat merujuk pada kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), keluarga rentan miskin, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan karena relasi gender yang belum setara dan adil.

Kesimpulan isu strategis/pembangunan kualitas sumber daya manusia meliputi fokus isu sebagai berikut:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) daya saing tenaga kerja;
- 4) Kemiskinan;
- 5) Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan;

#### **d. Isu Penguatan ekonomi dan daya saing daerah**

Merujuk program unggulan Bupati 2017-2022, penguatan ekonomi diprioritaskan bidang produksi hasil pertanian, perikanan, dan pariwisata yang berbasis budaya lokal dan penguatan pelaku UMK. Data menunjukkan bahwa kunjungan pariwisata di Kabupaten masih rendah. Pertumbuhan nilai ekspor juga masih rendah. Secara umum daya saing Kabupaten Pati masih rendah, yaitu rangking 27 dari 35 kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah menurut survei Bank Indonesia Perwakilan Kantor Jawa Tengah tahun 2016.

Kabupaten Pati dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kawasan strategis yaitu Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan. Kabupaten Pati terletak di jalur perdagangan nasional.

Dalam konstelasi MP3EI Kabupaten Pati termasuk Koridor Ekonomi Jawa memiliki tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”.

Kebijakan nasional dalam hal peningkatan produksi tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan menjadi peluang bagi Kabupaten Pati mendapatkan fasilitasi pengembangan daerah pertanian. Fokus isu strategis yang pertama harmonisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah, Kabupaten Pati memiliki potensi pengembangan pertanian, didukung lahan pertanian yang cukup luas dan memiliki sumber air pertanian yaitu dua waduk. Selain pertanian, Kabupaten Pati berada di sepanjang garis pantai, dan memiliki lahan budidaya perikanan dan lahan peternakan.

Sementara itu, salah satu aspek pendukung daya saing daerah adalah ketahanan pangan. Isu ketahanan pangan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas sumber pangan. Aspek yang dipenuhi (1) ketersediaan, kecukupan, stabilitas, aksesibilitas, kualitas, keterjangkauan serta keamanan pangan secara berkesinambungan; (2) mengamankan stok cadangan pangan dan pengendalian harga pangan di daerah. Indikasi ketahanan pangan mencakup produksi hasil tanaman padi, jagung, kedelai, gula, daging sapi dan produksi perikanan.

Fokus isu strategis kedua, kerjasama antar daerah dan penguatan stakeholder (pemangku kepentingan) untuk pengembangan daya saing daerah. Beberapa diantara yaitu:

- a. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) berperan mengkoordinasikan segala jenis usaha agribisnis dalam rangka peningkatan skala ekonomi dan efisiensi usaha;
- b. Kelompok Masyarakat (Pokmas) membantu pemerintah sebagai pengawas jika ada pelanggaran perusakan lingkungan;
- c. Forum penyelamat pesisir berperan dalam pemeliharaan dan pengendalian usaha mangrove;
- d. Kelompok wanita tani berfungsi sebagai wadah pemberdayaan wanita dalam pemanfaatan lingkungan untuk penganekaragaman dan keamanan pangan;
- e. Kelompok lumbung berperan dalam pengembangan ketahanan pangan masyarakat;

Dukungan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat sudah dilakukan, seperti program KUR bagi penguatan 'permodalan UMKM, revitalisasi pasar tradisional, pengembangan koperasi, pembentukan perangkat daerah yang menangani perizinan satu pintu untuk pengembangan usaha. Harmonisasi kebijakan daerah dengan pusat menjadi salah satu fokus isu pembangunan ekonomi.

Fokus ketiga adalah pengembangan nilai tambah sektor pertanian dan UMK dan perluasan jangkauan pemasaran. Kabupaten Pati masih menghadapi berbagai kelemahan untuk pengembangan daya saing ekonomi daerah, Permasalahan dan sistem produksi antara lain: (i) produktivitas belum sesuai dengan potensinya; (ii) keterkaitan antara sektor usaha mikro secara kelembagaan masih rendah; (iii) pertumbuhan wirausaha baru masih rendah; dan (iv) lembaga pendamping bisnis berbasis teknologi masih sangat sedikit. Dari sisi pemasaran, kemajuan teknologi informasi memberikan tantangan bagi kompetisi daya saing daerah menjadi lebih nyata dan cepat. Kabupaten Pati perlu mengembangkan kesiapan ekonomi digital untuk menghadapi tantangan ekonomi pasar global.

Fokus isu keempat adalah pengembangan pariwisata. Sehubungan dengan ditetapkannya provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu kawasan destinasi nasional, kabupaten Pati termasuk dalam kawasan wisata terintegrasi PAKUDJEMBARA: (Pati, Kudus, Demak, Jepara, Rembang, Blora). Sektor pariwisata menjadi unggulan Bupati 2017-2022. Kabupaten Pati juga sudah merencanakan penyusunan PERDA pengembangan pariwisata. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga masyarakat sadar wisata (POKDARWIS), dan pusat informasi pariwisata (TIC) dan terdapatnya

jalur wisata religi yang strategis di sekitar Kabupaten Pati. Sarana prasarana penunjang dan akses menuju objek wisata belum memadai dan belum optimalnya pengemasan budaya lokal yang menjadi salah satu daya tarik wisata.

Fokus kelima adalah isu konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah. Aktualisasi nilai budaya dan seni merupakan salah satu pilar penyangga daya saing daerah. Nilai budaya yang positif jika dihayati akan mampu mendorong produktivitas masyarakat. Sedangkan seni budaya dilestarikan sebagai kekayaan daerah, namun juga dapat dikembangkan dalam konteks mendorong industri kreatif masyarakat. Keduanya memberi nilai tambah bagi daya saing daerah.

Isu strategis bidang ekonomi diakomodir melalui misi ke-lima yaitu Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Selain itu juga misi ke-enam, yaitu. 'Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri'.

Dari kondisi di atas, isu strategis yang dihadapi pemerintah Kabupaten Pati di bidang pembangunan ekonomi dirumuskan dalam sub-isu berikut:

- 1) Harmonisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah;
- 2) Kerjasama antar daerah, kerjasama dengan dunia usaha, dan kerjasama dengan komunitas masyarakat untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pertukaran pengetahuan dan teknologi yang pro lingkungan (green economy);
- 3) Isu pengembangan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk daerah;
  - a. Peningkatan nilai tambah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan pengembangan UMK yang pro lingkungan (green economy);
  - b. Pengembangan Smart economy/ ekonomi digital/ e-commerce, - pemasaran potensi pertanian, perdagangan, industri, dan pariwisata berbasis teknologi informasi;
- 4) Ketahanan pangan;
- 5) Isu pengembangan potensi pariwisata;
- 6) Isu konservasi dan pengembangan kekayaan sejarah, dan seni budaya daerah;
- 7) Isu kondusivitas dan stabilitas daerah,
  - a. Kondusivitas pengurusan perizinan;

- b. Derajat Keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tank investasi;
- c. Penegakan hukum penggunaan lahan;

**e. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintah yang akuntabel dengan mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Isu bidang pemerintahan selaras dengan misi “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik”. Fokus misi ini adalah membangun unsur sikap perilaku dan budaya yang melekat pada aparatur (ASN) dalam mengutamakan pelayanan publik,

Isu tata kelola pemerintahan yang pertama perluasan jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik berbasis teknologi informasi (*e-Government*). Hal ini dilatarbelakangi oleh tuntutan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi (TI) diharapkan meningkatkan akuntabilitas publik berbasis data kinerja yang benar, andal dan akurat,

Isu ini tidak terlepas dari isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan. Transparansi informasi mencakup (i) informasi penyelenggaraan layanan publik; (ii) kinerja penyelenggaraan pemerintahan; (iii) pengelolaan keuangan daerah. Serangkaian proses tersebut memerlukan data kinerja yang benar, andal dan akurat. Data berperan penting dalam proses perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengambilan keputusan. Gerakan nasional e-Planning, e-Budgeting dan smart city menjadi keniscayaan bagi Pemerintah Kabupaten Pati menjawab isu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel berbasis *e-Government*.

Fokus isu ketiga adalah peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan efisiensi belanja daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.

Fokus isu tata kelola keempat yaitu peningkatan kualitas profesionalitas dan akuntabilitas ASN serta kelembagaan organisasi yang efektif dan efisien. Tata kelola yang baik selaras dengan isu reformasi birokrasi dan ASN berbasis kinerja.

Selanjutnya fokus kelima adalah isu harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah yang berbasis akurasi data dan implementatif merupakan salah satu fokus isu reformasi birokrasi. Termasuk dalam bagian ini adalah pengawasan dan penegakan hukum atas implementasi regulasi daerah. Dalam kurun waktu 2017-2022 Kabupaten Pati memerlukan: (1) Kebijakan peningkatan sumber pendapatan daerah; (2) kebijakan Sistem Inovasi Daerah

(SIDa); (3) partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan daya saing daerah; (4) kebijakan tentang pemanfaatan kekayaan alam yang pro keberlanjutan lingkungan; (5) Kebijakan pelaksanaan peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya.

Kesimpulannya, isu bidang pemerintahan adalah Isu tata kelola pemerintah (*governance*) yang bersih, profesional, responsif dan akuntabel, yang terdiri dari sub isu:

- 1) Perluasan jenis layanan administrasi pemerintah dan layanan publik yang responsif berbasis teknologi informasi (e-Government);
- 2) Isu transparansi perencanaan, monitoring, evaluasi dan pengawas berbasis TI dengan data yang andal dan terbaru;
- 3) Manajemen keuangan daerah dan peningkatan kapasitas fiskal;
- 4) Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN;
- 5) Harmonisasi regulasi daerah yang berbasis kajian kelitbangan;

## **2.2 Visi dan Misi Kabupaten Pati**

Visi dan misi Kabupaten Pati tahun 2017-2022 merupakan gambaran keadaan yang akan diwujudkan di bawah kepemimpinan kepala daerah terpilih 2017-2022 beserta arah tindakan yang dipersiapkan untuk mencapainya. Visi dan misi daerah diterjemahkan dalam tujuan, dan sasaran sebagai gambaran keadaan yang akan dicapai. Selanjutnya visi dan misi diindikasikan melalui tolok ukur tertentu yang merepresentasikan capaian keberhasilan dampak pembangunan. Penyusunan tujuan dan sasaran ini merujuk pada RPJPD Kabupaten Pati Tahun 2005 - 2025 (Sasaran Pokok Prioritas Pembangunan Tahap III) dan RPJMN Tahun 2015 - 2019 dengan mempertimbangkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 dan RTRW Kabupaten Pati 2010 - 2030. Visi misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 memiliki keterkaitan dengan visi misi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Tengah serta Penyelarasan dengan RTRW.

### **a. Visi**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 258 menyebutkan bahwa daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Visi Bupati - Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022, ditetapkan sebagai visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 - 2022 yaitu:

## **“MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN PELAYANAN PUBLIK”**

Visi tersebut memuat dua unsur fokus cita-cita, yaitu: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan (2) meningkatnya pelayanan publik. Penjelasan unsur visi Kabupaten Pati sebagaiberikut.

### **1. Unsur visi “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”**

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”, dimaksudkan sebagai implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan tujuan pemerintah daerah adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Sejahtera direpresentasikan dengan konsep terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, rasa aman dan nyaman. Kesejahteraan mencakup unsur Pembangunan Kualitas Manusia, kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial, rasa aman dan nyaman untuk tinggal dan bekerja, serta lingkungan hidup yang sehat berkelanjutan.

Kesejahteraan ekonomi direpresentasikan dengan tingginya pendapatan masyarakat sehingga meningkatkan daya beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya,

Kesejahteraan sosial merefleksikan kehadiran pemerintah, terutama untuk kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial juga ditandai oleh kemajuan kreativitas seni dan budaya masyarakat berarti juga kesiagaan perlindungan atas risiko kejadian bencana alam dan bencana sosial serta terjaganya kualitas lingkungan hidup.

Kesejahteraan masyarakat juga berarti kondisi hidup yang nyaman. Nyaman, berarti mengembangkan sebagai daerah yang kondusif untuk tempat tinggal, tempat berusaha atau bekerja, mengakses pelayanan publik, tempat persinggahan, rekreasi, dan berkreasi melestarikan adat istiadat. Nyaman berarti juga lingkungan hidup yang sehat dan baik untuk pertumbuhan generasi dan tersedianya sumber daya alam dengan daya dukung lingkungan yang optimal.

### **2. Unsur Visi “Meningkatnya Pelayanan Publik”**

“Meningkatnya Pelayanan Publik juga memenuhi amanat Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014. Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 344). Kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima memerlukan kinerja aparatur, kelembagaan dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel. Selain itu, hal tersebut juga memerlukan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pelayanan publik yang prima membutuhkan pengelolaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

Kemajuan sarana prasarana wilayah secara adil dan merata, dapat diposisikan sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib disediakan pemerintah, karena menjadi faktor utama untuk mendukung keberlangsungan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemenuhan ketersediaan infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Pati, termasuk wilayah perbatasan dengan kabupaten lain menjadi hal yang sangat mendesak demi terpenuhinya aspek pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Terpenuhinya pemerataan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana agar tidak terjadi:

- a) Peningkatan intensitas cakupan banjir, longsor dan kekeringan;
- b) Penurunan KEHATI;
- c) Peningkatan kerentanan terhadap perubahan iklim; dan
- d) Peningkatan alih fungsi lahan, sehingga pelayanan publik lebih optimal dan berkesinambungan.

Pemerataan dilakukan pemerintah agar pendapatan masyarakat terdistribusi secara maksimal dalam masyarakat. Pengertian merata berarti bahwa semua warga masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan dan kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas daerah.

Jadi pelayanan publik mengandung unsur: (1) Pelayanan barang dan jasa bagi masyarakat (pendidikan, kesehatan, papan, pelayanan administrasi dan perizinan usaha, pelayanan umum lainnya); (2) Profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas pemerintahan; (3) Implementasi teknologi Informasi; (4) Kemajuan sarana prasarana wilayah

## **b. Misi**

Perwujudan visi - pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Misi dirumuskan untuk mendukung perwujudan unsur visi. Keterkaitan misi dan visi Kabupaten Pati sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal;
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 3) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik;
- 5) Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
- 6) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
- 7) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
- 8) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

### **2.3 Keterkaitan Visi-Misi Kabupaten Pati 2017-2022 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Penjabaran visi misi Bupati Pati sebagai dasar perumusan sasaran hasil pembangunan daerah yang akan diwujudkan kurun 2017-2022. Penjabaran misi ke dalam tujuan dan sasaran strategis daerah didesain untuk mendukung pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pati tahun 2005- 2025, prioritas RPJMN tahun 2015-2019, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018. Keterkaitan visi misi RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022 dengan RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

#### **Keterkaitan antara Visi, Misi, Sasaran, dan Strategi**

<b>Visi : “Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>

<b>Misi 1 : Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal</b>		
Tujuan : 1.1. Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, menjaga ketenteraman sosial, dan melestarikan nilai unggul budaya	1.1.1. Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	1.1.1.1 Pendidikan karakter dan akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; 1.1.1.2. Peningkatan kenyamanan lingkungan;
	1.1.2. Meningkatnya pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai-nilai budaya	1.1.2.1. Pelestarian Seni, nilai budaya, warisan budaya.
<b>Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.</b>		
Tujuan : 2.1. Meningkatnya derajat kesehatan dan kualitas serta pemerataan akses pendidikan	2.1.1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	2.1.1.1. Komunikasi, Informasi, Edukasi Masyarakat untuk kesehatan promotif, Preventif, yaitu Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Keluarga Berencana
	2.1.2. Meningkatnya kualitas dan pemerataan akses pendidikan	2.1.2.1 Penyelenggaraan Layanan Pendidikan (formal dan

		nonformal) yang berkualitas untuk Semua;
	2.1.3. Meningkatnya kesetaraan kualitas penduduk laki-laki dan perempuan	2.1.3.1 .Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di semua PD; 2.1.3.2. Peningkatan peran lembaga perempuan dalam pembangunan gender.
<b>MISI 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.</b>		
Tujuan: 3.1. Penurunan tingkat kemiskinan	3.1.1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin	3.1.1.1 .Perluasan kesempatan kerja dan produktivitas melalui pengembangan kerjasama antara pemerintah dengan dunia usaha dan organisasi masyarakat

		<p>untuk;</p> <p>3.1.1.2. Peningkatan kapasitas masyarakat desa terutama ketahanan ekonomi melalui penguatan lembaga ekonomi perdesaan dan kelompok masyarakat;</p> <p>3.1.1.3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur dan sarana dasar bagi masyarakat miskin dan rentan;</p> <p>3.1.1.4. Peningkatan kualitas lingkungan sehat perumahan.</p>
	<p>3.1.2. Menurunnya penyanggah masalah kesejahteraan sosial</p>	<p>3.1.2.1. Pengembangan perlindungan dan pemberdayaan PMKS melalui pelatihan vokasi dan</p>

		peningkatan kesempatan kerja.
<b>MISI 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik.</b>		
Tujuan: 4.1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan SDM yang kompeten	4.1.1.1. Perencanaan dan penganggaran berbasis data, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi berbasis TIK 4.1.1.2. Peningkatan pelayanan publik melalui penguatan kapasitas dan profesionalitas aparatur, pengembangan TIK dan inovasi daerah; 4.1.1.3. Harmonisasi regulasi yang berbasis kajian kelitbang. 4.1.1.4. Pengembangan dan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan transparan, dan penerapan SPIP
	4.1.2. Meningkatnya	4.1.2.1. Peningkatan

	Kemandirian fiscal daerah	Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah melalui efisiensi anggaran, pengelolaan sumber - sumber pendapatan, dan penataan aset daerah.
<b>MISI 5 : Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.</b>		
Tujuan : 5.1.Peningkatan kesempatan kerja lokal dan produktivitas daerah	5.1.1.Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	5.1.1.1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui upaya peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga kerja,
	5.1.2. Meningkatnya produktivitas KUM	5.12.1. Kemitraan dengan pihak ketiga untuk mencari pasar produk usaha mikro; 5.1.2.2. Pengembangan kewirausahaan berbasis Teknologi informasi

		<p>sebagai bagian dan smart city;</p> <p>5.1.2.3. Peningkatan manajemen koperasi.</p>
<p><b>MISI 6 : Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri.</b></p>		
<p>Tujuan:</p> <p>6.1.Menguatnya pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah</p>	<p>6.1.1. Meningkatnya produktivitas dan inovasi di bidang/ sektor pertanian, perdagangan dan industri</p>	<p>6.1.1.1. Peningkatan produksi dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, penerapan teknologi ramah lingkungan, kerjasama pemasaran dengan daerah lain serta pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>6.1.1.2. Peningkatan kapasitas</p>

		<p>pedagang lokal melalui perlindungan pasar tradisional, peningkatan manajemen pasar daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>6.1.1.3. Peningkatan produksi industri melalui penerapan teknologi industri ramah lingkungan, dan pengembangan sentra industri potensial.</p>
	<p>6.1.2. Meningkatnya Investasi Daerah.</p>	<p>6.1.2.1. Peningkatan kepastian investasi dan kondusivitas usaha dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>6.1.2.2. Peningkatan promosi dan</p>

		kerjasama investasi
	6.1.3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.	6.1.3.1. Peningkatan keragaman sumber pangan masyarakat serta Pemerataan distribusi sumber pangan daerah selaras dengan upaya penanggulangan kemiskinan daerah.
	6.1.4. Meningkatnya daya saing daerah.	6.1.4.1. Peningkatan produktivitas komoditas unggulan pertanian dan perikanan melalui intensifikasi, dan penguatan kelembagaan; 6.1.4.2. Perluasan pasar dan pengembangan komoditas industri pengolahan pertanian, perikanan dan industri kreatif melalui peningkatan

		<p>kapasitas pelaku industri.</p> <p>6.1.4.3. Pengembangan destinasi wisata unggulan melalui peningkatan sarana prasarana, penguatan kapasitas pelaku, dan promosi wisata.</p>
<p><b>Misi 7 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah.</b></p>		
<p>Tujuan:</p> <p>7.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah</p>	<p>7.1.1 .Terpenuhinya infrastruktur bagi pengembangan produktivitas ekonomi, konektivitas wilayah dan pengembangan kawasan</p>	<p>7.1.1.1. Pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi melalui pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur wilayah dengan tetap memperhatikan</p>

		<p>daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana.</p> <p>7.1.1.2. Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan serta kerawanan bencana.</p>
<p><b>MISI 8 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan.</b></p>		
<p>Tujuan :</p> <p>8.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</p>	<p>8.1.1. Menurunnya kerusakan lingkungan</p>	<p>8.1.1.1. Peningkatan indeks kualitas air melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan</p>

		<p>sampah dan limbah domestik, penguatan fungsi pengawasan lingkungan;</p> <p>8.1.1.2. Peningkatan luasan tutupan lahan melalui perluasan dan pengelolaan ruang terbuka hijau.</p>
8.2. Menurunnya rasio bencana	8.2.1. Meningkatnya kesiagaan masyarakat untuk mitigasi bencana	<p>8.2.1.1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui Desa tangguh Bencana;</p> <p>8.2.1.2. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah</p>

### **BAB III**

#### **KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI**

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) secara prinsip telah diatur oleh Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Republik Indonesia masing-masing Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan SIDa. Untuk menyiapkan dan atau memperkuat SIDa diperlukan konsep dasar yang jelas dan dapat diimplementasikan.

SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkan kembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha dan masyarakat di daerah. Penguatan SIDa diperlukan untuk mengefektifkan dan efisiensi pengelolaan inovasi dalam rangka eksistensi peningkatan ekonomi daerah.

#### **3.1. Kondisi Sistem Inovasi Daerah yang Akan Dicapai**

Kondisi pembangunan Kabupaten Pati sampai saat ini cenderung dijelaskan oleh besaran faktor-faktor ekonomi yang menggerakkan proses pembangunan. Oleh karena itu, guna meningkatkan daya saing dan kompetensi dan pengelolaan potensi ekonomi Kabupaten pati, perlu dilakukan upaya transformasi secara sistematis. Melalui kerangka Sistem Inovasi Daerah (SIDa) diharapkan menggeser paradigma penghubung Kabupaten Pati agar mulai digerakan oleh proses-proses yang semakin efisien dengan mendayagunakan Iptekin. Pada posisi tersebut, faktor inovasi menjadi kata kunci baru dalam mewujudkan peningkatan efisien dan kualitas proses dan hasil pembangunan. Berpangkal pada argumentasi kebutuhan transformasi dalam Pembangunan Kabupaten Pati di atas, maka perlu disusun strategi penguatan SIDa yang sinergis dengan RPJMD Kabupaten Pati.

Penguatan SIDa lebih lanjut perlu menyusun skema pentahapan penciptaan kondisi inovasi sebagai penggerak proses pembangunan (innovation-driven development) kabupaten Pati tahun 2018-2022. Untuk mencapai kondisi innovation-driven development pada tahun 2022, akan diwujudkan melalui sesuatu penetapan pengaturan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati, yaitu :

##### **a. Terciptanya Daya Dukungan SIDA Kabupaten Pati (2018-2022 )**

Untuk meningkatkan kerangka dasar (pondasi) SIDa Kabupaten Pati, kebijakan penguatan daya dukung bagi berbagai aktivitas inovatif dapat

menjadi jawabanya. Sistem inovasi pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari kolaborasi aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaktif, dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan Inovasi pembangunan daerah.

Penguatan daya dukung SIDA perlu diarahkan kepada proses pengembangan Iptekin pada berbagai basis produksi unggulan sampai pada tataran masyarakat pedesaan. Transformasi basis produksi unggulan perlu diarahkan menuju terwujudnya kapasitas daya dukung kelembagaan, jejaring, dan kesumberdayaan yang handal.

Kebijakan penguatan daya dukung sistem inovasi di Kabupaten Pati merupakan wahana memperkuat pondasi SIDA dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera menuju penciptaan kondisi innovation-driven development pada tahun 2022, ada beberapa fokus penguatan tahap awal (pertama) atau penciptaan daya dukung SIDA yaitu :

#### 1). Penataan Kelembagaan bagi Inovasi Pembangunan

Tahapan (milestone) awal ini berfokus pada upaya penataan unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan daya dukung SIDA khususnya pada upaya mendukung penciptaan iklim daerah yang kondusif bagi berbagai kegiatan inovasi. Arah pengembangan kelembagaan pada tahap awal ini berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, dan dunia usaha. Penguatan sistem inovasi daerah SIDA, dan internalisasi budaya inovasi melalui berbagai sosialisasi keinovasian.

Tahap pertama penataan kerangka kelembagaan SIDA Kabupaten Pati ini juga terkait dengan upaya pengenalan budaya inovasi dalam berbagai organisasi/kelembagaan inovasi daerah. Tujuan agenda itu ialah membangun landasan budaya kreatif-inovatif pada masyarakat Kabupaten Pati.

Penataan daya dukung kelembagaan Iptekin perlu didukung melalui agenda pemetaan potensi unggulan desa-desa di Kabupaten Pati untuk dikembangkan secara inovatif. Maka, dalam tataran pengembangan kelembagaan perlu dibangun kerangka model pengembangan desa inovasi sebagai strategi pengembangan berbasis kelembagaan SIDA yang terarah secara kokoh, sistematis, berkelanjutan, dan bersinergi dengan agenda penguatan SIDA pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan SINas (Sistem Inovasi Nasional).

#### 2). Penataan Kerangka Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan

Pada unsur jejaring, yang perlu diperhatikan pada tahapan awal adalah menumbuhkembangkan berbagai kolaborasi atau kerja sama dalam proses inovasi dan difusi Iptekin (praktik baik/terbaik/atau hasil kelitbangan). Tujuan utamanya ialah merintis terciptanya interaksi produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, serta menyebarkan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten Pati.

Guna menciptakan kerangka sistematis dalam pengembangan kerangka jejaring SIDA, maka perlu didorong melalui agenda pengembangan Kabupaten Pati Inovatif. Pengembangan iklim kondusif bagi proses-proses inovasi hanya mungkin dilaksanakan melalui dukungan unsur-unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten secara inovatif. Kemajuan SIDA di Kabupaten Pati akan ditentukan oleh seberapa cepat dan kuat pondasi jejaring inovasi dapat didorong oleh Pemerintah Kabupaten dengan segenap pengaku kepentingan yang ada.

### 3). Penataan Kerangka Penguatan Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan

Penataan kerangka penguatan kesumberdayaan sangat strategis dalam upaya mengantisipasi dinamika social masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (*knowledge economy*) dan masyarakat pengetahuan (*knowledge society*). Dan, arah pengembangan kesumberdayaan SIDA Kabupaten Pati perlu diwujudkan melalui peningkatan kesadaran berbagai pihak terhadap aspek strategis Iptekin bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan bidang-bidang pembangunan.

Maka, tahap awal penataan kerangka kesumberdayaan perlu dilakukan melalui upaya menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan kesumberdayaan UMKM. Tujuannya utamanya ialah mendorong aktivitas inovasi UMKM saling bersinergi, meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan mulai memahami perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Tujuan utamanya adalah terjadinya penguatan rantai nilai Pengembangan UMKM berbasis teknologi di Kabupaten Pati. Lebih jauh perlu mulai membentuk jiwa kewirausahaan (*teknopreneur*) masyarakat agar mampu mengelola berbagai aktivitas inovatif menuju pada pembentukan keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di Kabupaten Pati.

## **b. Pemantapan Kapasitas SIDA di Kabupaten Pati (Tahun 2019-2020)**

Arah pengembangan pada tahapan kedua ini adalah terciptanya pemantapan kapasitas inovasi dari berbagai kelembagaan SIDA di Kabupaten Pati. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan dan hasilnya pada peningkatan besaran produk berbagai usaha masyarakat, dan perluasan bidang-bidang baru yang akan mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

### **1) Penguatan kapasitas Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan**

Tahap (*milestone*) kedua yang yang hendak dicapai dalam penataan unsur kelembagaan guna mendukung pemantapan kapasitas SIDA adalah semakin kuatnya unsur-unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan kerangka umum yang semakin kondusif bagi inovasi. Arah pengembangan kelembagaan pada tahap kedua ini intinya berkaitan dengan tujuan menciptakan iklim daerah yang yang semakin kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintahan, aktivitas ekonomi masyarakat pedesaan, dan dunia usaha. Perwujudan pemantapan daya dukung unsur organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi.

Penataan kapasitas kelembagaan Iptekin perlu didorong melalui pengembangan berbagai potensi usaha unggulan desa-desa di Kabupaten Pati. Maka, Target capaian dalam tataran pengembangan desa inovasi adalah semakin kuatnya kelembagaan proses inovasi produktif di segenap pedesaan di Kabupaten Pati.

Tahap kedua penataan kerangka kelembagaan SIDA Kabupaten Pati ini terkait pula dengan upaya pemantapan budaya inovasi dalam berbagai organisasi/lembaga inovasi di lingkup Kabupaten Pati. Tujuan agenda itu ialah mulai mantapnya landasan budaya kreatif-inovatif dan kohesi sosial masyarakat.

### **2) Penguatan Kapasitas Jejaring Bagi Inovasi Pembangunan**

Tahap kedua jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung pemantapan kapasitas SIDA Kabupaten Pati adalah semakin banyaknya kolaborasi atau kerjasama dalam proses inovasi dan difusi Iptekin (praktikbaik/terbaikdan/atau hasil kelitbagan). Tujuan utamanya ialah tercapainya interaksi interaktif dan produktif multi pihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya. Penyebarluasan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik dilingkup Kabupaten.

Guna menciptakan kerangka sistematis dalam pengembangan kerangka jaringan SIDA, maka agenda Pengembangan Pati Inovasi perlu memiliki target yang diwujudkan melalui semakin matangnya dukungan penyelenggaraan unsur-unsur pemerintah dalam berbagai proses inovatif di daerahnya. Pengembangan kapasitas SIDA Kabupaten Pati di tentukan oleh komitmen dukungan pemerintahan daerah dalam melakukan pengembangan jejaring inovasi sebagai proses yang produktif agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3) Penguatan Kapasitas Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan

Arah pengembangan kesumberdayaan SIDA pada tahap kedua perlu diwujudkan melalui peningkatan kesadaran berbagai pihak terhadap aspek strategis Iptekin bagi pengembangan kegiatan ekonomi dan bidang-bidang pembangunan.

Pemantapan kapasitas kesumberdayaan SIDA perlu diwujudkan melalui upaya pemantapan berbagai proses inovatif dan memperkuat keterpaduan pemajuan kesumberdayaan UMKM di kabupaten Pati. Tujuan utamanya ialah mendorong aktivitas inovasi UMKM yang semakin bersinergi, mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan daerah. Tujuan khususnya adalah terjadinya penguatan kapasitas Pengembangan UMKM Berbasis Teknologi di Kabupaten Pati dan perluasan jiwa kewirausahaan (teknopreneur) masyarakat agar mampu mengelola berbagai kegiatan inovasi menuju pada pembentukan keuntungan ekonomi yang semakin nyata.

### **c. Terwujudnya Daya Saing SIDA Kabupaten Pati Tahun (2021-2022)**

Tahapan ketiga ini merupakan tahapan lanjut dari proses pemantapan kapasitas SIDA Kabupaten Pati. Arah pengembangan pada tahapan (*milestones*) ketiga ini adalah tercapainya daya saing berbagai inovasi yang dikembangkan oleh berbagai lembaga. Hal tersebut akan terlihat dari semakin luasnya wilayah pengembangan, mantapnya produksi dan kualitas berbagai usaha masyarakat, kemampuan penyesuaian dengan berbagai tuntutan global dan perluasan cakupan bidang-bidang baru yang mampu dikembangkan secara inovatif baik pada organisasi pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.

#### 1) Penciptaan Daya Saing Unsur Kelembagaan Bagi Inovasi Pembangunan

Tahap (*milestones*) ketiga hendaknya dicapai dalam penataan unsur kelembagaan guna mendukung perwujudan daya saing SIDA Kabupaten Pati adalah semakin kuatnya unsur-unsur kelembagaan guna mendukung penciptaan kerangka umum yang semakin kondusif, khususnya bagi aktivitas pemerintah, aktivitas ekonomi masyarakat perdesaan, dan dunia usaha. Perwujudan-perwujudan daya saing Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati dilakukan melalui pemantapan kapasitas organisasi, kerangka regulasi, dan internalisasi budaya inovasi. Tahap ketiga penataan kerangka kelembagaan SIDA terkait pula dengan upaya pemantapan budaya inovasi dalam berbagai organisasi/lembaga inovasi daerah. Tujuan agenda itu ialah semakin handalnya landasan budaya kreatif-inovatif, kewirausahaan, dan kohesi sosial masyarakat di Kabupaten Pati.

## 2) Penciptaan Daya Saing Jejaring Bagi Inovasi Pembanguna

Tahapan ketiga unsur jejaring yang perlu dicapai dalam mendukung perwujudan daya saing SIDA di Kabupaten Pati adalah semakin meratanya kolaborasi atau kerjasama dalam proses inovasi dan difusi Iptekin (praktik baik/terbaik, dan/atau hasil kelitbangan). Tujuan utamanya ialah terciptanya interaksi yang semakin intensif dan produktif multipihak yang saling menguntungkan bagi perkembangan inovasi dan difusinya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik di lingkup Kabupaten dan interelasinya dengan Kabupaten lain di Jawa Tengah.

Guna menciptakan kerangka sistematis dalam mengembangkan kerangka jejaring SIDA di Kabupaten Pati, maka agenda Pengembangan Inovatif Daerah perlu membidik target pembangunan kualitas daya saing. Pengembangan iklim inovasi yang semakin kondusif yang diwujudkan melalui semakin real dan mantapnya dukungan peyelenggaraan unsur-unsur Pemerintahan Kabupaten dalam berbagai proses inovasi.

## 3) Penciptaan Daya Saing Kesumberdayaan Bagi Inovasi Pembangunan

Arah pengembangan kesumberdayaan SIDA perlu diwujudkan melalui upaya pemantapan berbagai proses inovatif dan memperkuat keterpaduan pemajuan kesumberdayaan UMKM. Tujuan utamanya ialah mendorong aktifitas inovasi UMKM yang semakin berkualitas, bersinergi, mampu meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan semakin dapat menguasai dan mampu melakukan penyesuaian dengan perkembangan global untuk di manfaatkan bagi kepentingan daerah.

Lebih lanjut dalam aspek kewirausahaan (teknopreneur) masyarakat perlu senantiasa didorong agar semakin menunjukkan prospek pengembangan dan keuntungan yang semakin mantap. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai penyesuaian atas berbagai tantangan dan tuntutan dalam persaingan global.

### **3.2 Target Capaian SIDA Kabupaten Pati**

Pengembangan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati diarahkan untuk mencapai sasaran dan target-target indikator prioritas outcome sebagai berikut :

1. Meningkatnya persentase tujuan destinasi wisata dengan promosi online.
2. Pertumbuhan klaster wisata di lokasi-lokasi potensi wisata strategis.
3. Pertumbuhan kewirausahaan berbasis teknologi yang ditunjukkan dengan indikator jumlah IKM baru berbasis teknologi.
4. Pertumbuhan nilai tambah dari produk-produk pertanian akibat diterapkannya teknologi industri yang ditunjukkan dengan indikator presentase peningkatan produk pertanian.
5. Peningkatan lapangan kerja yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat pengangguran sebesar 1% per tahun.

### **3.3. Langkah-Langkah Pencapaian Indikator SIDA**

#### **a. Kebijakan SIDA**

Langkah-Langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA pada aspek kebijakan berikut :

- 1) Menetapkan Roadmap SIDA Kabupaten Pati dalam bentuk peraturan Bupati;
- 2) Mensosialisasikan Roadmap SIDA Kabupaten Pati kepada perangkat daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat untuk berpartisipasi dalam implementasi SIDA;
- 3) Mengintegrasikan program kegiatan SIDA dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah yaitu RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah agar sinergi dalam peningkatan daya saing daerah berbasis sumber daya daerah melalui sistem inovasi daerah;
- 4) Mengkoordinasikan implementasi program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah kedalam rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
- 5) Menyusun pedoman serta mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan dalam pelaksanaan penguatan SIDA di kota Pati;

## **b. Kelembagaan SIDA**

Langkah-langka yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA pada aspek kelembagaan sebagai berikut:

- 1) Melakukan penataan Lembaga/organisasi untuk meningkatkan kapasitas lembaga/organisasi sehingga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan daya saing daerah dalam mendukung penguatan SIDA, sebagai berikut :
  - Membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kabupaten Pati sesuai dengan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan peraturan pemerintah tentang Perangkat daerah, yang dibawahnya adalah terdapat unit Sentra HKI untuk mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI, termasuk memasarkan hasil-hasil litbangnya.
  - Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan Dewan Riset Daerah dalam penguatan SIDA di Kabupaten Pati.
  - Meningkatkan kapasitas dan pelibatan lembaga litbang perguruan tinggi dalam berbagai penelitian yang mengarah pada penguatan SIDA pada berbagai sektor sesuai dengan keunggulan masing-masing perguruan tinggi.
  - Mendorong lembaga perguruan tinggi (universitas, politeknik, Sekolah Tinggi) baik negeri maupun swasta serta SMK di Kabupaten Pati.
  - Membentuk unit inkubator teknologi, unit inkubator bisnis, unit intermediasi, unit Konsultasi Teknologi dan bisnis, dan unit promosi bisnis.
  - Membentuk forum klaster untuk mendorong setiap klaster inovasi/industri dapat mengembangkan dirinya, dan sebagai wahana antar perusahaan yang saling terkait dan bekerjasama, diantaranya melibatkan pemasok barang, penyedia jasa, industri yang terkait serta lembaga yang secara khusus berfungsi sebagai pelengkap atau penunjang.
  - Mendorong organisasi kemasyarakatan terkait SIDA agar dapat berperan serta dalam penguatan SIDA di Kabupaten Pati.
- 2) Melakukan penataan Peraturan terkait SIDA agar regulasi yang didapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA guna mencapai tujuan peningkatan daya saing daerah, sehingga peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan kebijakan SIDA dapat selaras yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memetakan peraturan / kebijakan yang ada terkait penguatan SIDA
  - b. Inventarisasi peraturan/kebijakan pusat, provinsi, dan Kabupaten Pati terkait penguatan SIDA (menghambat atau mendukung SIDA), dan mengidentifikasi kebutuhan regulasi daerah dalam rangka penguatan SIDA
  - c. Mengusulkan dan merekomendasikan pencabutan atau perubahan peraturan/kebijakan daerah yang menghambat penguatan SIDA di Kabupaten Pati
  - d. Menyusun regulasi, kebijakan, pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA di Kabupaten Pati pada perangkat daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi, dan unsur masyarakat
- 3) Melakukan penataan Norma/Etika/Budaya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai profesionalisme para pelaku penguatan SIDA sehingga dapat mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA guna mencapai tujuan peningkatan daya saing daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi kebutuhan tata norma/etika/budaya kerja yang diperlukan dalam menunjang penguatan SIDA.
  - b. Menyusun tata norma/etika/budaya kerja dalam menunjang penguatan SIDA sesuai dengan kebutuhan.
  - c. Mensosialisasikan tata norma/etika/budaya kerja dalam menunjang penguatan SIDA kepada aparatur pelaksana SIDA dan mengimplementasikannya melalui regulasi daerah.

### **c. Jaringan SIDA**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA pada aspek jaringan SIDA sebagai berikut :

1. Membangun komunikasi intensif antara lembaga SIDA. Komunikasi intensif antar lembaga SIDA dimaksudkan untuk membangun konsesus, menyamakan persepsi, berbagi ide dan gagasan, menyusun strategi bersama, menetapkan tujuan dan saran bersama, menyusun program/kegiatan, serta melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan kegiatan/program yang disepakati. Fasilitas komunikasi tersebut dikoordinasikan oleh tim koordinasi SIDA yang pelaksanaannya melalui Bappeda Kabupaten Pati, antara lain :

- a. Menyelenggarakan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan rutin bulanan/dua bulanan untuk membahas tema/isu tertentu yang memerlukan intervensi teknologi ataupun kegiatan kelitbangan untuk menyelesaikannya dengan melibatkan seluruh stakeholder SIDA, termasuk forum-forum kelitbangan, dan forum-forum klaster industri
- b. Menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA dengan membentuk konsorsium kelitbangan dengan melibatkan lembaga kelitbangan perguruan tinggi dan pengguna hasil litbang (koperasi, UKM, industri dll), dimana masing-masing pihak memiliki tujuan yang sama, serta terikat dengan komitmen termasuk dalam hal *sharing* pendanaan yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama.
- c. Membentuk dan memberdayakan forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah. Pembentukan forum dimulai dengan menginventarisasi institusi di daerah yang memiliki aktifitas kelitbangan, atau potensial untuk melakukan kelitbangan.
- d. Mobilisasi sumber daya manusia, yaitu perpindahan, maupun penempatan sementara SDM litbang dari suatu lembaga/organisasi SIDA ke lembaga/organisasi SIDA yang lain. Mobilisasi SDM dilakukan melalui kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, maupun keterampilan SDM.

#### **d. Sumber Daya SIDA**

Penataan sumber daya SIDA dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA yang ada pada kelembagaan SIDA. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA pada aspek sumberdaya SIDA sebagai berikut:

1. Melakukan inventarisasi dan membuat basis data SDM, HKI dan sarana-prasarana litbang yang tersedia di Kabupaten Pati, baik yang dikelola oleh pemerintah, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, maupun swasta.
2. Mempublikasikan basis data SDM, HKI dan sarana-prasarana litbang secara luas ke masyarakat, baik melalui media brosur maupun *website*.

#### **e. Pengembangan SIDA**

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pencapaian target indikator SIDA pada aspek pengembangan SIDA sebagai berikut:

1. Membangun komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui daya saing daerah sumber daya lokal dalam kerangka Sistem Inovasi Daerah.
2. Melakukan evaluasi dan analisis penguatan SIDA untuk mendapatkan data hasil pelaksanaan penguatan SIDA selama 1 tahun periode dengan mengukur capaian indikator output dan outcome.
3. Mengadakan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi bagi peningkatan daya guna dan hasil guna penguatan SIDA.

**Tabel 3.1**  
**Penguatan Sida Kabupaten Pati**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Penguatan kelembagaan inovasi daerah Kabupaten Pati	Membangun kelembagaan system inovasi Kabupaten Pati yang efektif dan efisien dengan pengembangan e-government sampai Pada pemerintahan terendah dan masyarakat	Fasilitas penguatan SIDA termasuk e-government untuk mendukung aspek-aspek pra produksi, proses produksi dan pasca produksi dalam sector usaha pertanian / agribisnis dan pariwisata	1. Mengembangkan kerangka umum kebijakan inovasi dan bisnis di Kabupaten Pati; 2. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi (iptekin/ penelitian, pengembangan dan perekayasa (litbangyasa) kelitbangan serta kemampuan absorpsi iptekin oleh industry khususnya usaha mikro kecil dan

<p>Penguatan jejaring daerah Kabupaten Pati</p>	<p>Mewujudkan kolaborasi multipihak (ABCG) guna mewujudkan konektifitas dan pengelolaan lingkungan fisik dan sosial</p>	<p>Pengembangan jaringan inovasi dengan menguatkan jaringan government untuk mendukung aspek-aspek pra produksi, proses produksi dan pasca produksi dalam sector usaha pertanian</p>	<p>menengah (UMKM);  3. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik (good/best practice) dan hasil litbangyasa;  4. Membangun budaya inovasi di Kabupaten Pati;  5. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan system inovasi Kabupaten Pati;</p>
---	---	--	--

Penguatan kesumberdayaan inovasi Kabupaten Pati	Meningkatkan kemampuan pengelolaan potensi inovasi daerah yang terintegrasi guna menumbuhkembangkan ekonomi produktif berbasis potensi Kabupaten Pati	Pengembangan klaster industri, pengembangan teknonoprene, pengembangan sumber daya daerah untuk mendukung aspek-aspek pra produksi proses prioritas dan pasca produksi dalam sntra usaha pertanian, agribisnis dan pariwisata	6.Meningkatkan penyelarasan pembangunan dengan perkembangan global.
---	---	---	---

**Tabel 3.2**

**Kondisi S1Da Yang Akan Dicapai Kabupaten Pati Tahun 2022**

No	Pilar Prakarsa Penguatan SIDA	Kerangka Kebijakan Inovasi	Kondisi SIDA yang akan dicapai (2022)
1	<b>Pilar 1: Penguatan Sistem Inovasi Daerah</b>	Elemen 1 : Kerangka umum yang kondusif	a. Basis data / Indikator Pentingnya inovasi terbangun dan mudah diakses;

		bagi Inovasi dan bisnis	b. Sistem perizinan penanaman modal yang cepat,mudah, murah, transparan,akuntabel dan kompetitif berjalan efektif.
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a. Kelembagaan penguatan sistem Inovasi berfungsi secara efektif; b. SDM iptekin mulai terbentuk,khususnya di kalangan pemuda.
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a. Kaidah-kaidah SIDA telah tersosialisasi di seluruh aktor didaerah; b. Peran pos pelayanan teknologi (posyantek) dan warung teknologi (wartek) optimal.
		Elemen 4: Budaya	a. Apresiasi terhadap

		inovasi	kegiatan kreatif inovatif berkembang;
			b. Partisipasi masyarakat dalam berinovasi telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a. Kerjasama antar daerah sekitar berjalan baik bagi pembangunan daerah;
			b. Kerjasama antar pusat daerah mulai berjalan baik bagi pembangunan daerah.
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan global	a. Kesetaraan gender meningkat;
			b. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan meningkat;
			c. Kesadaran Hak Kekayaan intelektual (HKI) di masyarakat meningkat;
			d. Fasilitas untuk masyarakat difabel tersedia.
2	<b>Pilar 2: Penguatan Klaster Industri</b>	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a. Kelembagaan pengelola pengembangan klaster industri sudah berfungsi;
			b. Landasan legal bagi

			<p>pengembangan klaster Industri prioritas daerah telah diterbitkan;</p> <p>c. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah dan Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata diimplementasikan secara optimal;</p>
			<p>d. Pelaku wisata yang mulai berkembang;</p> <p>e. Pusat informasi kepariwisataan berjalan efektif;</p> <p>f. Rencana induk pengembangan klaster industri agromina telah tersusun.</p>
		<p>Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung Ilmu pengetahuan, teknologi dan Inovasi (iptekin) atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a. Pasokan iptekin di bidang integrasi agromina tersedia;</p> <p>b. Daya serap Iptekin pelaku industri agromina sudah meningkat;</p> <p>c. Daya serap iptekin pelaku industri agromina (on-farm dan off-farm) meningkat;</p> <p>d. Pasokan iptekin industri pariwisata tersedia.</p>

		Elemen 3 Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a. Interaksi antara para pemangku kepentingan di industri agromina dengan pemasok iptekin mulai berjalan baik b. Interaksi antara para pemangku kepentingan di Industri pariwisata dengan pemasok iptekin mulai berjalan.
		Elemen 4 : Budaya Inovasi	a. Budaya Inovasi di Industri agromina berkembang; b. Budaya inovasi di industri pariwisata berkembang.
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Rantai nilai di kluster industri agromina dan pariwisata mulai kuat.
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	a. Aktivitas kluster Industri agromina dan pariwisata telah memperhatikan lingkungan; b. Aktivitas Master industri agramina dan pariwisata mulai menggunakan - standar nasional/internasional.
3	<b>Pilar 3: Penguatan Jaringan Inovasi</b>	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	a. Kawasan khusus berbasis iptekin mulai dibangun; b. Instrumen legal

			penetapan kawasan khusus berbasis iptekin telah disusun.
		Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	a. Pusat litbangyasa telah tersedia;
			b. Perguruan Tinggi di kawasan khusus berbasis iptekin mulai diprakarsai,
			c. Industri pengguna iptekin dikawasan khusus berbasis iptekin mulai ada.
		Elemen 3 : Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi	a. Lembaga pengelola kawasan khusus berbasis iptekin terbentuk;
			b. Pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau Broadband Learning Center (BLC) sudah berjalan efektif.
		Elemen 4: Budaya Inovasi	Budaya berjejaring antara aktor inovasi berkembang.

		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	a. Keterkaitan antar kawasan khusus berbasis iptekin dengan telecenter atau BLC terbangun; b. Sinergitas antara kawasan khusus berbasis iptekin dengan pusat unggulan di daerah lain sudah terjalin,
		Elemen 6 : Keselarasan dengan perkembangan global	Produk kawasan khusus berbasis iptekin memiliki standar nasional / internasional.
4	<b>Pilar 4: Penguatan Teknopreneur</b>	Elemen 1 : Kerangka umum yang konduusif bagi inovasi dan bisnis	Skema pembiayaan dari Pemerintah daerah bagi pengembangan tersedia, bisnis inovatif
		Elemen 2: Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologidan Inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi Industri, khususnya usaha	a. Kelembagaan pusat inovasi telah terbentuk; b. Kapasitas absorpsi iptekin UMKM meningkat c. Inisiatif berwirausaha berbasis iptekin dari kalangan pemuda mulai meningkat.

		mikro, kecil dan menengah (UMKM)	
		Elemen 3 :Kolaborasi bagi Inovasi dan difusi Inovasi	a. Jumlah UKM inovatif bertambah; b. Interaksi antara penghasil teknologi dan kalangan bisnis khususnya UMKM berkembang.
		Elemen 4: Budaya inovasi	Budaya menciptakan kesempatan/ lapangan kerja di kalangan pendidikan tinggi berkembang,
		Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah	Jenis usaha inovatif potensial untuk mendukung klaster industri prioritas berkembang.
		Elemen 6: Keselarasan dengan perkembangan	a. Produk dan bisnis Inovatif yang terstandar sudah ada;
		global	b. Kerjasama nasional /internasional dalam pengembangan bisnis inovatif sudah terjalin.
5	<b>Pilar 5: Pengembangan TematikDaerah</b>	Elemen 1: Kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis	Rencana induk pengembangan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat mencakup air bersih, teknologi Informasi dan komunikasi sudah tersedia.

		<p>Elemen 2 : Kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin)/atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan (litbangyasa) serta kemampuan absorpsi Industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)</p>	<p>a. Pasokan iptekin air bersih, teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat;</p> <p>b. Kapasitas absorpsi masyarakat terhadap iptekin air bersih, teknologi informasi dan komunikasi meningkat.</p>
		<p>Elemen 3: Kolaborasi bagi inovasi dan difusi inovasi</p>	<p>a. Interaksi pengembangan green innovation development (GJD) tersedia;</p> <p>b. Kerjasama litbangyasa airbersih, teknologi informasi dan komunikasi mulai meningkat</p>
		<p>Elemen 4: Budaya inovasi</p>	<p>Budaya GID di setiap SKPD dan masyarakat meningkat.</p>
		<p>Elemen 5 : Keterpaduan/ koherensi pemajuan sistem inovasi di daerah</p>	<p>Kebijakan daerah dalam pembangunan ruang terbuka hijau (air bersih, teknologi informasi dan komunikasi) sudah selaras,</p>
		<p>Elemen 6: Keselarasan dengan</p>	<p>a. Standar pembangunan ruang terbuka hijau</p>

		perkembangan global	infrastruktur (air bersih, teknologi informasi dan komunikasi) sudah ada;
			b. Kerjasama internasional dalam pembangunan ruang terbuka hijau infrastruktur (air bersih, teknologi Informasi dan komunikasi) sudah terjalin.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SIDA**

#### **4.I Tujuan Penguatan Sistem Inovasi Daerah**

Berbagai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tentunya mengarah kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Inovasi Daerah merupakan salah satu kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentunya kebijakan tersebut mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), selanjutnya mendukung Pembangunan Daerah yang sudah disusun dan bersinergi dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Sinergitas Rencana Pembangunan Daerah dengan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) menghidupkan berbagai kreativitas dan mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih berkreasi dalam mencari berbagai bentuk pembaruan dalam mendukung Tata Kelola Pemerintahan Daerah. Kreativitas penyelenggaraan pemerintahan menjadi gaya/cara baru pada saat ini yang dilakukan beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia, tentunya Kabupaten Pati melalui Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang bersinergi dengan Pembangunan Daerah dapat memberikan wama yang lebih nyata dalam menjawab berbagai tantangan sekaligus memanfaatkan peluang yang ada,

Kabupaten Pati untuk Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) berkaitan erat dalam mendukung berbagai Strategi Pembangunan Daerah yang menjadi sasaran utama adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai bentuk Kreativitas dan Inovasi pada aspek Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat, dan Tata Kelola Pemerintahan. Tentunya Penguatan SIDA tersebut dapat menjawab tantangan rencana pembangunan Kabupaten Pati yang menjadi isu strategis antara lain:

- a. Isu sarana prasarana wilayah dan kerja sama antar daerah;
- b. Isu pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana;
- c. Isu pembangunan kualitas sumber daya saing manusia, kemiskinan dan kesejahteraan sosial;
- d. Isu penguatan ekonomi daya saing daerah;
- e. Isu tata kelola pemerintah yang bersih, profesional dan akuntabel dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi strategi

Diharapkan dengan Inovasi Daerah yang merupakan salah satu alat bagi Pemerintah Daerah guna mendukung penyelesaian berbagai isu strategis yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan serta mendorong optimalisasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Hal tersebut nantinya mendorong Kemandirian Daerah dalam pencapaian dan peningkatan Daya Saing Daerah.

Menjadi menarik dengan memperhatikan isu strategis pada angka 4 (Empat) Penguatan ekonomi dan daya saing daerah. Tentunya hal tersebut berkaitan sangat erat dengan suatu kelembagaan dalam mendukung Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Daya Saing Ekonomi Daerah merupakan capaian terhadap berbagai Inovasi Daerah yang diciptakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah khususnya di Kabupaten Pati. Untuk itu, pendekatan pada Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata yang diusung dalam Penguatan SIDa ini menjadi sangat kuat dan beralasan.

AGROMINA-WISATA menjadi landasan dasar dalam mendukung Penguatan SIDa di Kabupaten Pati mengingat besarnya sumberdaya alam yang dimiliki pada 3 (Tiga) sektor tersebut. Nantinya diharapkan dalam Penguatan SIDa ketiga sektor tersebut menjadi sektor pengungkit bagi peningkatan Daya Saing Daerah dan juga sekaligus peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

#### **4.2 Arah Kebijakan Sistem Inovasi Daerah**

Tiga sektor yaitu Sektor Pertanian, Sektor Perikanan dan Sektor Pariwisata nantinya dikembangkan menjadi sektor roda penggerak bagi Penguatan SIDa. Kolaborasi dari ketiga sektor tersebut mendorong terbentuknya sebuah klaster (wadah inovasi) yang disebut AGRO MINA WISATA. Tentunya penguatan SIDa dengan arah kebijakannya mencoba menumbuhkembangkan berbagai peran serta dari berbagai para pemangku kepentingan. sehingga capaian dan target yang ditetapkan dapat didukung secara utuh dan keberhasilan Kabupaten Pacitan dalam berinovasi menjadi katalisator dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dukungan terhadap arah kebijakan SIDa menjadi sangat penting, mengingat Inovasi Daerah sudah terbukti secara empirikal menjadi salah satu faktor pengantar (intervening) dalam mengoptimalkan kerja Pemerintah Daerah dalam mendorong pertumbuhan Daya Saing Daerah. Untuk itu, kebijakan Inovasi Daerah di Kabupaten Pati perlu dibangun

dalam suatu kerangka kebijakan yang melibatkan berbagai unsur dan peran serta para pemangku kepentingan, sehingga seiring sejalan dengan kerangka Inovasi pada kebijakan Tingkat Nasional dan juga pada Tingkatan Wilayah (Provinsi) sebagai suatu kerangka kebijakan dasar yang konkret.

Arah kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pati dalam wadah untuk meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah perlu menjadi kerangka kebijakan yang utuh untuk selanjutnya bersinergi dengan kerangka kebijakan Pembangunan Daerah dimana arah kebijakan ditujukan untuk:

- a. Menjadikan Kelitbangan/Inovasi Daerah sebagai langkah utama dalam merumuskan berbagai kebijakan yang bersifat inovatif guna mendukung sektor yang menjadi pilihan dalam Penguatan SIDA;
- b. Meningkatkan sinergitas berbagai dan peran serta Inovasi Daerah dalam akselerasi terhadap peningkatan daya saing perekonomian daerah;
- c. Kolaborasi para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam kerangka dukungan berbagai kebijakan Penguatan SIDA Kabupaten Pati.

#### **4.3 Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pati**

Penguatan Sistem Informasi Daerah (SIDa) merupakan seperangkat kebijakan untuk membentuk suatu mekanisme yang terukur, terarah. Dan terkendali dalam menyiapkan kelembagaan inovasi daerah yang masuk dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan tersebut mendorong tumbuh kembangnya interaksi berbagai aktor inovasi daerah dengan melalui berbagai kegiatan yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan kolaboratif antar para aktor inovasi daerah yang meliputi : Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat yang bersinergi dalam wadah yang disiapkan dan dibangun secara bersama – sama.

Bangunan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati di harapkan dapat menggerakkan berbagai komoditas pertanian, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh pemerintah daerah melalui berbagai strategi yang dibangun dalam buah kerangka kebijakan inovasi daerah yang menyeluruh dan menjadi satu kesatuan utuh yang saling bersinergi. Pada akhirnya sektor tersebut menghasilkan berbagai produk yang dapat melipatgandakan keuntungan dan juga kemanfaatannya dapat dirasakan masyarakat.

#### **4.4 Misi Penguatan Sistem Inovasi Daerah**

Guna mendukung pelaksanaan Inovasi Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pati, disusun kerangka Misi

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung keberhasilan pelaksanaannya. Adapun Misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan sinergitas Inovasi Daerah dalam mendukung pembangunan guna penuntasan berbagai permasalahan melalui koordinasi, konsolidasi, dan konsultasi bersama para pemangku kepentingan;
- b. Peningkatan kapasitas kelembagaan litbang Kabupaten Pati guna mendukung dan memperkuat terhadap implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa);
- c. Komitmen bersama dari para pemangku kepentingan guna bersama-sama mewujudkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) hingga terwujudnya suatu wahana Inovasi Daerah yang berbasiskan potensi dan karakteristik daerah;
- d. Dukungan kebijakan berbasis peningkatan daya saing ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan berbagai potensi perekonomian

#### **4.5 Arah Pengembangan Wilayah Kabupaten Pati sesuai SWP (Satuan Wilayah Pembangunan)**

Kabupaten Pati merupakan wilayah pantai utara Jawa yang mengalami perkembangan pesat akibat dukungan Jalan Arteri Premier Lintas pantura. Kegiatan yang akan berkembang di Kabupaten seiring dengan peran jalan pantura sebagai penghubung kota – kota penting di Pulau Jawa adalah perdagangan–jasa, pusat jasa pemasaran, industri, dan pergudangan. Selain itu di wilayah kabupaten pati telah berkembang ekonomi lokal seperti : pertanian, perikanan, industri kecil kuningan, tapioka, dan lain – lain. Potensi lokal dan potensi dukungan akses regional diharapkan akan mendorong terwujudnya hubungan ekonomi produksi dan distribusi yang saling menguntungkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani, berbasis keunggulan pertanian dan industri yang berkelanjutan. Mempertimbangkan potensi sektor unggulan di 10 Kecamatan, pengembangan wilayah di Kabupaten Pati selama kurun waktu 2017 – 2022 akan dilakukan melalui intervensi terhadap 6 bagian wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dalam RTRW, yaitu Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) I, II, III, V, dan VI.

##### **a. Potensi dan Keunggulan Wilayah**

Keadaan topografi wilayah Kabupaten Pati sebagian besar merupakan dataran rendah sehingga potensial menjadi daerah pertanian. Dominasi

penggunaan lahan paling besar Kabupaten Pati adalah sawah tadah hujan, 22.163 Ha (38% dari total luas Kabupaten Pati). Potensi lain di Kabupaten Pati adalah adanya tanah kapur. Keberadaan tanah kapur berpotensi digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen. Terdapat rencana pengembangan prasarana jalan provinsi (jalan kolektor primer) yang menghubungkan wilayah daerah dengan Kawasan Perkotaan Jepara, Kawasan Perkotaan Kudus, dan Kawasan Perkotaan Purwodadi. Selain jaringan jalan terdapat pengembangan system perkeretaapian. System kereta api antarkota tersebut menghubungkan Semarang-Demak-Kudus-Pati-Rembang.

SWP Kawasan I terdiri dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Pati, Margorejo, Gembong, dan gabus. Pusat pengembangan SWP kawasan I adalah Kawasan Perkotaan Pati.

SWP Kawasan II meliputi tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tlogowungu, Trangkil, serta Margoyoso. Ibukota Kecamatan Trangkil merupakan pusat pengembangan SWP Kawasan II.

Terdapat empat kecamatan yang termasuk dalam SWP Kawasan III. Keempat Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Gunungwungkal, dan Tayu. Sesuai RT/RW Kabupaten, maka kawasan perkotaan Tayu merupakan pusat pengembangan yang direncanakan pada SWP Kawasan III.

SWP Kawasan IV terdiri dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Wedarijaksa, Juwana, Batangan. Pusat pengembangan SWP kawasan IV ini terletak pada Kawasan Perkotaan Juwana, di Kecamatan Juwana direncanakan pengembangan pelabuhan niaga sebagai pendukung kegiatan industry, perdagangan dan jasa. Pelabuhan khusus juga dikembangkan untuk mendukung kegiatan industry di Kecamatan Batangan.

SWP Kawasan V meliputi empat kecamatan, yakni kecamatan Pucakwangi, Winong, Jaken, Jakenan. Ibukota Kecamatan Jakenan merupakan pusat pengembangan SWP Kawasan V.

Terdapat tiga kecamatan yang termasuk dalam SWP Kawasan VI. Ketiga kecamatan tersebut adalah kecamatan Tambakromo, Kayen, dan Sukolilo sesuai RT/RW Kabupaten Pati, maka kawasan Perkotaan Kayen merupakan pusat pengembangan yang direncanakan pada SWP Kawasan VI.

#### **b. Tujuan dan sasaran**

Tujuan dan sasaran pengembangan disusun dengan mempertimbangkan potensi yang ada pada wilayah. Komoditas andalan kabupaten Pati adalah pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran. Mengacu pada RTRW Kabupaten

Pati, tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Pati adalah terwujudnya Kabupaten Pati sebagai Bumi Mina Tani. Basis tujuan tersebut yaitu keunggulan pertanian serta industri yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka sasaran yang ditetapkan untuk seluruh wilayah Kabupaten Pati adalah : a) meningkatkannya integrasi hubungan kota-desa (urban-hinterland); b) meningkatnya prasarana wilayah yang mendorong ekonomi local; c) menguatnya system pertanian pada kawasan agropolitan; d) optimalnya komoditas perikanan dalam pengembangan kawasan pesisir; e) menguatnya industri berbasis potensi local berupa pertanian (agroindustry) dan perikanan, serta f) terwujudnya pusat pelayanan baru JAKATINATA.

**c. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Sesuai SWP**

Strategi dan arah kebijakan daerah sesuai swp digambarkan dalam tabel dibawah ini.

**Tabel IV – 1**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan SWP I**

<b>Tujuan SWP I</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
	Meningkatnya integrasi desa-kota (urban – hinterland) di wilayah SWP I	Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah urban dan hinterland	Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah urban dan hinterland
		Peningkatan jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di hinterland dengan pusat perkotaan SWP I	Meningkatnya jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di hinterland dengan pusat perkotaan SWP I
	Mengkuatnya system	Peningkatan produksi pertanian pada wilayah hinterland SWP I (Kecamatan Gembong)	Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah hinterland SWP I (Kecamatan Gembong)

Pengembangan SWP I sebagai wilayah dengan fungsi; Pemerintahan Kabupaten; Perdagangan dan Jasa, Industri Pengolahan, Agro Industri, Transportasi, dan Pertanian	agropolitan (agro - industry) wilayah SWP I	Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) pada wilayah Kecamatan Gembong	Meningkatkan infrastruktur pendukung ( proses olahan dan penyimpangan ) pada wilayah kecamatan Gembong
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi)	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP I	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung intenal wilayah SWP I
		Peningkatan ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa	Meningkatnya ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa
	Meningkatnya integrasi kawasan strategis antar wilayah SWP	Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir
Meningkatnya pengembangan industry manufaktur pada SWP I	Peningkatan kuantitas industry besar pada Kecamatan Pati yang holistic dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kuantitas industry besar pada Kecamatan Pati yang holistic dan berwawasan lingkungan	

**Tabel IV – 2**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan SWP II**

<b>Tujuan SWP II</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Pengembangan SWP II sebagai wilayah dengan fungsi; Pertanian, perkebunan, perdagangan, dan agro Industri, Transportasi, dan Pertanian	Meningkatnya integrasi desa-kota ( <i>urban-hinterland</i> ) di wilayah SWP II	Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>	Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>
		Peningkatan jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP II	Meningkatnya jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat perkotaan SWP II
	Menguatnya system agropolitan (agro-industri) wilayah SWP II	Peningkatan produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP II	Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah <i>hinterland</i> SWP II
		Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) serta infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan) agro - industri

		antar wilayah agro - industri	
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi)	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP II	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP II
		Peningkatan fungsi sub – terminal wilayah	Meningkatnya fungsi sub – terminal wilayah

**Tabel IV – 3**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan SWP III**

<b>Tujuan SWP III</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Pengembangan SWP III sebagai wilayah dengan fungsi; Pertanian, perkebunan, perdagangan, dan agro Industri, Transportasi, dan Pertanian	Meningkatnya integrasi desa-kota (urban-hinterland) di wilayah SWP III	Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah urban dan hinterland	Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah urban dan hinterland
		Peningkatan jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di hinterland	Meningkatnya jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di hinterland dengan pusat

		dengan pusat perkotaan SWP III	perkotaan SWP III
	Menguatnya system agropolitan (agro-industri) wilayah SWP III	Peningkatan produksi pertanian pada wilayah hinterland SWP III (Kecamatan Gunungwungkal dan Cluwak)	Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah hinterland SWP I (Kecamatan Gunungwungkal dan Cluwak)
		Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan)	Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan)
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP III	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP III
		Peningkatan ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di	Meningkatnya ketersediaan jalan bebas hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa

		Pulau Jawa	
--	--	------------	--

	Meningkatnya integrasi kawasan antar wilayah SWP	Peningkatan integrasi infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Dukuhseti ke wilayah penunjangnya	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir di Kecamatan Dukuhseti ke wilayah penunjangnya.
--	--	---	--

**Tabel IV – 4**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan SWP IV**

<b>Tujuan SWP IV</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Pengembangan SWP IV sebagai wilayah dengan fungsi; Pertanian, perkebunan, perdagangan, dan agro Industri, Transportasi, dan Pertanian	Meningkatnya integrasi desa-kota ( <i>urban-hinterland</i> ) di wilayah SWP IV	Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>	Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>
		Peningkatan jaringan pemasaran non – fisik wilayah	Meningkatnya jaringan pemasaran non – fisik wilayah

		produksi di hinterland dengan pusat pelayanan	produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan
	Menguatnya system agropolitan(agro-industri) wilayah SWP IV	Peningkatan produksi pertanian pada wilayah hinterland	Meningkatnya produksi pertanian pada wilayah hinterland
		Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan)	Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan)
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana perhubungan (transportasi)	Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP IV	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan arteri penghubung internal wilayah SWP IV
		Peningkatan fungsi kawasan SWP IV sebagai salah satu pusat penghubung (hub) bagi transportasi laut	Meningkatnya fungsi kawasan SWP IV sebagai salah satu pusat penghubung (hub) bagi transportasi laut
		Peningkatan ketersediaan jalan bebas	Meningkatnya ketersediaan jalan bebas

		hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa	hambatan penghubung Kabupaten Pati dan kabupaten lainnya di Pulau Jawa
	Meningkatnya integrasi kawasan strategi antar wilayah SWP	Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pesisir
	Meningkatnya pengembangan industri pada SWP IV	Peningkatan kuantitas industri yang holistik dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kuantitas industri besar dan berwawasan lingkungan

**Tabel IV – 5**

**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah kebijakan SWP V**

<b>Tujuan SWP V</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Pengembangan SWP V sebagai wilayah dengan fungsi; Pertanian, perkebunan, perdagangan,	Meningkatnya integrasi desa-kota ( <i>urban-hinterland</i> ) di wilayah SWP V	Peningkatan infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>	Meningkatnya infrastruktur pendukung integrasi produksi – distribusi wilayah <i>urban</i> dan <i>hinterland</i>

dan agro Industri, Transportasi, dan Pertanian		Peningkatan jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di hinterland dengan pusat pelayanan	Meningkatnya jaringan pemasaran non – fisik wilayah produksi di <i>hinterland</i> dengan pusat pelayanan
	Menguatnya system agropolitan(agro-industri) wilayah SWP V	Peningkatan produksi pertanian pendukung agro industri pada wilayah hinterland SWP V	Meningkatnya produksi pertanian pendukung agro industri pada wilayah hinteland SWP V
		Peningkatan infrastruktur pendukung (proses olahan dan penyimpanan)	Meningkatnya infrastruktur pendukung (proses dan penyimpanan)
	Meningkatnya integrasi kawasan strategi antar wilayah SWP	Peningkatan ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pertanian	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur transportasi dan pengangkutan pendukung pengembangan wilayah pertanian

#### **d. Sinergi Antar SWP di Kabupaten Pati**

Setiap Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) memiliki potensi yang beragam oleh karenanya dapat dilakukan melalui pembentukan benang – benang interaksi yang kuat diantara SWP baik I, II, III, IV, V, dan VI (Lihat tabel VI.19). adanya potensi di satu SWP bisa jadi mampu mengatasi masalah yang ada di SWP lainnya. Untuk itulah interaksi diperlukan sehingga tercapai simbiosis mutualisme dan mampu meminimalisir kesenjangan yang saat ini terjadi bahkan dimaksudkan untuk bisa mengoptimalkan.

Potensi yang menonjol dari SWP I adalah tersedianya ruang yang cukup sebagai area pengembangan kota. Selain itu, keberadaan jalur pantura menjadikan tingginya aksesibilitas di SWP I. Selain memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai Central Business District kawasan kota dengan skala pelayanan kota, juga memiliki peluang untuk dikembangkan produksi pertanian hinterland dan industri. Wilayah ini akan berkontribusi terhadap SWP di sekitarnya, terutama SWP II, IV, V dalam konteks pengembangan wilayah pesisir. Sementara untuk SWP lainnya yang berorientasi pada pengembangan agroindustri, fungsi utama SWP I dapat mendukung pemasaran hasil produksi sebagai pusat perdagangan.

Potensi SWP II yang menonjol adalah potensinya sebagai pusat pertumbuhan kawasan pesisir. Peluang yang dapat disinergikan dengan SWP I ini akan memperkuat keterkaitan antar wilayah yang memberikan multiplier effect yang lebih besar bagi wilayah hinterland lainnya. Potensi ini juga mampu bersinergi dengan arahan fungsi yang sama di SWP III dan SWP IV untuk pengembangan wilayah pesisir yang terintegrasi.

SWP III memiliki potensi dua fungsi selain sebagai pusat pengembangan wilayah pesisir, juga sebagai wilayah pusat pengembangan produksi pertanian. Keadaan ini memungkinkan SWP III berkontribusi terhadap wilayah pesisir lainnya seperti SWP II dan IV sebagai jejaring pusat pertumbuhan wilayah pesisir yang terintegrasi. Sementara untuk SWP lainnya yang memiliki potensi pengembangan pertanian seperti SWP V dan VI, SWP III mampu memperkuat jejaring pusat pengembangan pertanian. Penguatan jejaring ini dapat berkontribusi untuk meratakan kesejahteraan di pusat pertumbuhan dan wilayah penunjangnya.

Sementara untuk potensi SWP IV sebagai wilayah industri akan berkontribusi terhadap wilayah pesisir yang termasuk dalam SWP II dan SWP

III sebagai pusat pengolahan. Sementara fungsi sinergitas dengan SWP I dari sistem transportasi dan industri memungkinkan pengembangan wilayah yang lebih merata dan multiplier effect pertumbuhan pada SWP yang terletak di sekitar SWP IV dan SWP I. Selain itu, dengan adanya arahan fungsi konservasi alam di wilayah SWP IV akan menjaga kelestarian (sustainability) alam yang bermanfaat bagi keseluruhan wilayah Kabupaten Pati.

Potensi yang menonjol dari SWP V adalah pengembangan pusat perkembangan Kota JAKATINATA yang menjadi simpul pertumbuhan yang terintegrasi dengan simpul pertumbuhan lainnya, terutama SWP I. Sementara manfaatnya untuk wilayah dengan fungsi pertanian, pengembangan kotasebagai pusat pertumbuhan baru dapat bermanfaat sebagai pusat pemasaran produk pertanian seperti pada SWP II dan SWP III. Selain itu, SWP V juga memiliki fungsi konservasi alam yang berfungsi untuk kelestarian alam keseluruhan wilayah Kabupaten Pati.

SWP VI memiliki fungsi yang paling menonjol sebagai simpul produksi dan distribusi pertanian bagi SWP sekitarnya yang memiliki fungsi sebagai wilayah pengembangan pertanian. Pada SWP VI juga memiliki fungsi arahan utama pusat pertumbuhan kota terintegrasi JAKATINATA yang dapat disinergikan dengan pusat pertumbuhan di SWP I. Sinergi yang diperkuat dengan integrasi sistem transportasi ini akan bermanfaat untuk pemerataan kesejahteraan pada wilayah hinterland.

#### **4.6 Arah kebijakan pembangunan**

**Tabel IV.6**

**Tema Pembangunan Kabupaten Pati**

Tema Pembangunan Kabupaten Pati
Tema 2017 : “Lokal Unggulan” – Pengembangan Layanan Dasar dan perekonomian wirausaha Berbasis Karakter unggul Budaya Lokal
Tema 2018 : “Lokal Berjejaring” – <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kualitas Layanan Publik dan Pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan)</li> <li>b. Serta mengembangkan jejaring Perdagangan, Pariwisata, dan Budaya untuk meningkatkan produktivitas Daerah</li> <li>c. Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan kelestarian Lingkungan</li> </ul>
Tema 2019 : “Jejaring Berdaya Saing” – Pengembangan Daya Saing Daerah Didukung Kemandirian Masyarakat Berbasis Keunggulan Lokal Berbasis Teknologi

Informasi Komunikasi dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan							
Tema 2020 : “Merata Bersama: - Pemerataan pembangunan Antarwilayah menuju Pembangunan yang inklusif, memenuhi pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan, perumahan) dengan menjaga lingkungan Berkelanjutan							
Tema 2021 : “Pasar Dunia” – Kemitraan Dunia Usaha untuk memperluas Jaringan Pemasaran Produk Lokal berbasis Teknologi Informasi Komunikasi dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan							
Tema 2022 : “Selamat Sejahtera” – Pemantapan Kualitas pembangunan Kesejahteraan							
<b>Misi</b>	<b>Arah kebijakan RPJMD Kab. Pati 2017-2022</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
MISI 1	1.1. Pendidikan Karakter masyarakat untuk mengenali & melestarikan warisan budaya, serta bertindak menurut nilai – nilai keunggulannya.		✓	✓	✓	✓	✓
	1.2. Meningkatkan pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai – nilai budaya		✓	✓	✓	✓	✓
MISI 2	2.1 Kemitraan Pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk pembangunan kesehatan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2.2 Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan inklusif		✓	✓	✓		
	2.3 Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pengarusutamakan gender di semua bidang kehidupan		✓	✓	✓		
MISI 3	3.1 Kemitraan Pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk		✓	✓	✓	✓	✓

	memperkuat daya saing tenaga kerja serta relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan						
	3.2 Memperluas dan meningkatkan pelayanan dasar	✓	✓		✓		
	3.3 Meningkatkan keberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menyuluruh pada setiap aspek kehidupan	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 4	4.1 Reformasi Birokrasi untuk pelayanan yang akuntabel dan ASN berintegrasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 Peningkatan kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 5	5.1 Kemitraan Pemerinta, dunia usaha, masyarakat untuk penambahan penyerapan tenaga kerja dan lapangan usaha		✓	✓	✓		✓
MISI 6	6.1 Kemitraan pemerintah, dunia usaha, masyarakat untuk pengembangan investasi dan inovasi produktivitas sektor pertanian, perdagangan dan industri			✓	✓	✓	✓
	6.2 Meningkatkan kondusivitas iklim usaha		✓	✓	✓	✓	✓
	6.3 Peningkatan produksi dan keadilan distribusi pangan	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	6.4 Pembangunan dan penguatan kelembagaan pariwisata		✓	✓	✓	✓	✓
MISI 7	2.1 Pemenuhan infrastruktur dasar dan penunjang dalam kondisi memadai	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MISI 8	8.1 Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam untuk mengurangi kerusakan lingkungan dan risiko bencana		✓	✓	✓	✓	✓

**Tabel IV.7**

**Prioritas RPJPD Kabupaten Pati 2005-2022 dan Prioritas  
RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022**

No	RPJPD Kabupaten Pati 2005-2022	RPJMD Kabupaten Pati 2017-2022
1	Mewujudkan SDM yang berkualitas dan berbudaya	Agenda 1 : Karakter unggulan dan pelestarian budaya lokal Agenda 2 : Peningkatan kualitas sumber daya manusia
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian, perikanan serta pemanfaatan SDA dan IPTEK dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan	Agenda 3 : Pemberdayaan masyarakat
3	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik didukung kompetensi dan profesionalisme aparatur, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme	Agenda 4 : Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang akuntabel
4	Mewujudkan prasarana dan sarana yang memadai untuk	Agenda 7 : Pembangunan infrastruktur

	mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi ekonomi kerakyatan	
5	Mewujudkan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha guna mendorong daya saing daerah	Agenda 5 : Investasi, UMKM dan perluasan penyerapan tenaga kerja Agenda 6 : Penguatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah
6	Mewujudkan pengembangan pariwisata yang berbasis budaya lokal	Agenda 5 : Pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi dan memperluas lapangan kerja Agenda 1 : Pembangunan karakter unggul masyarakat dan pelestarian kekayaan budaya lokal

#### 4.7 Arah Kebijakan dan Strategi SIDA

Keberadaan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta pelaksanaan inovasi di lingkup Pemerintah Daerah secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi kelitbangan di kabupaten/kota dilaksanakan melalui penyelenggaraan 7 kegiatan yang disebut sebagai kelitbangan utama yang terdiri dari penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan utama berorientasi pada kualitas hasil, *outcome*, dan mendukung inovasi. Kelitbangan utama bertujuan untuk menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Selain itu, perangkat litbang daerah di kabupaten/kota juga melaksanakan kelitbangan pendukung yang mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama. Kegiatan kelitbangan

dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang pada akhirnya berujung pada tujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di segala bidang.

Kebijakan kelitbangan adalah serangkaian kebijakan yang akan ditempuh oleh Perangkat litbang daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Terdapat 3 aspek penting yang menjadi arah penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Pati yaitu : 1). penguatan kebijakan berbasis kelitbangan; 2) penguatan inovasi; dan 3) penguatan kelembagaan kelitbangan. Oleh karena itu, kebijakan kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati diarahkan untuk : 1). mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 2) mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 3) mendorong peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Kebijakan kesatu yang berfokus pada aspek penguatan kebijakan berbasis kelitbangan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik” sehingga indikator kelitbangan terkait yaitu persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat tercapai. Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/3522/SJ tentang Penguatan Penelitian dan Pengembangan Daerah disebutkan bahwa kegiatan kelitbangan di daerah dilaksanakan secara satu pintu di perangkat litbang daerah.

Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bukan berarti bahwa perangkat litbang daerah menjadi satu-satunya pelaksana kelitbangan di daerah. Kelitbangan dapat dilakukan di masing-masing perangkat daerah namun harus direncanakan dan dikoordinir oleh perangkat litbang daerah dan topik-topik kelitbangan harus sesuai dan mengacu pada rencana induk kelitbangan. Kelitbangan yang dilakukan oleh perangkat daerah harus sesuai dan menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut misalnya pengukuran, pengambilan data, survey yang bersifat rutin/reguler, naskah akademik, studi kelayakan dan sebagainya. Perangkat daerah tersebut telah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur yang mencukupi. Selanjutnya kelitbangan yang dilaksanakan perangkat daerah dilaporkan dan

dinventarisir oleh perangkat litbang daerah untuk kelengkapan database kelitbangan dan pada akhirnya dapat diketahui persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan daerah. Pelaksanaan kelitbangan secara satu pintu bertujuan untuk menghindari duplikasi, meningkatkan sinkronisasi, dan agar efektif dalam pencapaian visi misi pembangunan daerah.

Kebijakan kedua yang berfokus pada aspek penguatan inovasi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan misi keempat pembangunan daerah yaitu “Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri” sehingga indikator kelitbangan yang terkait yaitu persentase inovasi yang sudah terbentuk menjadi sistem inovasi daerah (SIDa) dapat tercapai.

Inovasi daerah diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran inovasi daerah antara lain : 1). pengembangan kreativitas penyelenggaraan pemerintahan daerah berorientasi inovasi; 2). terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan inovasi daerah; 3). terselenggaranya upaya menumbuhkembangkan inovasi di daerah; 4). terbudayakannya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; 5). terwujudnya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, manajemen pemerintahan daerah, aktivitas perekonomian daerah, dan aktivitas masyarakat; dan 6). peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui : 1). peningkatan pelayanan publik; 2). pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi daerah diselenggarakan berdasarkan 8 prinsip yaitu : 1). peningkatan efisiensi; 2). perbaikan efektivitas; 3). perbaikan kualitas pelayanan; 4). tidak menimbulkan konflik kepentingan; 5). berorientasi kepada kepentingan umum; 6). dilakukan secara terbuka; 7). memenuhi nilai kepatutan; dan 8). dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Bentuk-bentuk inovasi daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu : 1). inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; 2). inovasi pelayanan publik; dan/atau 3). Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kebijakan ketiga yang berfokus pada aspek penguatan kelembagaan kelitbangan diarahkan agar BAPPEDA sebagai perangkat litbang daerah

mampu berjalan secara mandiri maupun bersama-sama dengan institusi/lembaga kelitbangan (perguruan tinggi, lembaga penelitian, dewan riset daerah, dll) mampu menjalankan fungsikelitbangan dan berperan sebagai pelaksana teknis dalam mengkoordinasi inovasi daerah

Penguatan kelembagaan kelitbangan bersifat ke dalam yang artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah, BAPPEDA memiliki sumber daya yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. Penguatan kelembagaan bersifat keluar artinya bagaimana sebagai perangkat litbang daerah harus dapat merangkul dan bekerjasama dengan semua pihak maupun lembaga agar fungsi kelitbangan dapat dilaksanakan secara optimal.

Dengan memperhatikan arah kebijakan kelitbangan maka disusunlah strategi agar tujuan pelaksanaan kelitbangan dan inovasi daerah di Kabupaten Pati dapat tercapai.

1. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong peningkatan kualitas dan pemantapan regulasi/kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
  - a. Penyiapan landasan regulasi/kebijakan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, khususnya berkenaan dengan program legislasi daerah (Prolegda) yang menjadi kebutuhan perangkat daerah;
  - b. Evaluasi dan penyiapan rekomendasi atas pelaksanaan regulasi/kebijakan dalam rangka efektifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminimalisir “Perda bermasalah”;
  - c. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah;
  - d. Penyiapan kerangka kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berorientasi jangka panjang;
  - e. Asistensi penyusunan RPJMD, evaluasi RKPD, dan APBD serta evaluasi kinerja perangkat daerah setiap tahun;
2. Arah kebijakan kelitbangan untuk mendorong penguatan dan penciptaan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diwujudkan melalui strategi antara lain:
  - a. Pembinaan dan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) guna menumbuhkembangkan suasana yang kondusif bagi terciptanya inovasi di daerah;

- b. Fasilitasi dan implementasi kebijakan dan program inovasi di daerah yang bersumber dari hasil invensi dan difusi; dan
  - c. Evaluasi, pelaporan, dan penilaian atas pelaksanaan inovasi di daerah.
3. Arah kebijakan kelitbangan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan penguatan kapasitas kelembagaan diwujudkan melalui strategi antara lain:
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan, khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap melalui rekrutmen reguler, alih fungsi dan/atau *inpassing* sesuai ketentuan perundang-undangan (diutamakan berkualifikasi pendidikan S2 dan S3);
  - b. Memenuhi kelengkapan organisasi kelitbangan (Majelis Pertimbangan, Tim Pengendali Mutu & Tim Kelitbangan);
  - c. Diseminasi dan publikasi hasil-hasil kelitbangan;
  - d. Peningkatan fasilitas pendukung kelitbangan (*website, openjournal system, perpustakaan, aplikasi kelitbangan, dll*)
- Indikasi program-program prioritas kelitbangan disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- 1) misi pembangunan daerah;
  - 2) urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - 3) program prioritas dan program unggulan daerah; dan
  - 4) isu-isu strategis.

**Tabel IV.8**

**Program – program Prioritas SIDA Bidang Pemerintahan dan Social Budaya**

Misi	Sasaran	Program kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Misi 1 : Meningkatkan akhlak budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.	Terwujudnya masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat.	Penegakan peraturan daerah	2017 - 2022	SATPOL PP
		Penyakit masyarakat, kriminalitas dan pelanggaran K3	2017 - 2022	SATPOL PP
	Tercapainya cakupan pelayanan administratif publik	Layanan kependudukan dan catatan sipil	2017 - 2022	DISDUKCAPIL
	Meningkatkan aktualisasi pelestarian Seni dan Budaya	Pelestarian warisan karya budaya, adat istiadat, nilai – nilai budaya	2017 - 2022	DISDIKBUD
Misi 2: Menigkatkan kualitas sumber daya	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Partisipasi masyarakat dalam berperilaku hidup sehat	2017 - 2022	DINKES
		Akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualiats	2017 - 2022	DINKES

manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan.		Kepemilikan dan layanan jaminan kesehatan di masyarakat	2017 - 2022	DINKES
		Akses pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	2017 - 2022	DINSOS
	Pemerataan kualitas dan pemerataan pendidikan	Pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar	2017 - 2022	DISIKBUD
		Pemerataan distribusi dan kualitas tenaga pengajar	2017 - 2022	DISIKBUD
		Akses dan kualitas layanan pendidikan dasar termasuk perpustakaan	2017 - 2022	ARPUSDA
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan	Meningkatnya kesetaraan penduduk laki – laki dan perempuan (kesetaran gender)	Kesenjangan gender di sektor pendidikan, kesehatan dan tenaga kerja	2017 - 2022	DINSOS
		Perencanaan dan penganggaran kebijakan/program/kegiatan responsive gender	2017 - 2022	DINSOS
	Meningkatnya ketahanan pangan	Desa mandiri pangan	2017 - 2022	KETAPANG

pelayanan pendidikan dan kesehatan	masyarakat	Penanganan kawasan rawan pangan	2017 - 2022	KETAPANG
Misi 3: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Terwujudnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa	Pengembangan desa mandiri	2017 - 2022	DISPERMADES
	penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Perlindungan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2017 - 2022	DINSOS
Misi4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	2017 - 2022	DISDUKCAPIL
		Pengintegrasian sistem jaringan arsip daerah dan digitilisasi dokumen/arsip daerah	2017 - 2022	ARPUSDA
		Realisasi pencapaian RPJMD	2017 - 2022	BAPPEDA
	Reformasi birokrasi	Manajemen Aparatur Sipil	2017 - 2022	BKPPP

**Tabel IV.9**

**Program – program Prioritas SIDA Bidang ekonomi**

Misi	Sasaran	Program kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunya tingkat kemiskinan	Pemberdayaan masyarakat miskin	2017 - 2022	DISNAKER
		Pengelolaan data kemiskinan terpadu	2017 - 2022	DISNAKER
		Pelayanan dasar bagi rakyat miskin	2017 - 2022	DPUTR
		Penanganan kawasan kumuh	2017 - 2022	DISPERKIM
Misi 4: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2018 - 2022	SETWAN
		Meningkatnya kemandirian fiscal daerah	Manajemen keuangan dan aset daerah	2017 – 2022
		Penerimaan pendapatan asli daerah	2017 – 2022	BPKAD

pelayanan publik					
Misi 5: Meningktakan pemberdayaan UMKM dan pengusaha membuka investasi, memperluas kerja.	Meningkatkan kesempatan kerja lokal produktivitas daerah	Kapasitas lembaga pelatihan	2017 - 2022	DISNAKER	
		Kapasitas lembaga pelatihan kerja daerah	2017 - 2022	DISNAKER	
		Pemetaan angkatan kerja	2017 - 2022	DISNAKER	
		Penguatan kewirausahaan masyarakat	2017 - 2022	DINKOP & UMKM,	
	Meningkatnya pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro (UMKM)	Kualitas SDM dan kelembagaan	2017 - 2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN	
		Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)	2017 - 2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN	
		Akses kredit KUM	2017 - 2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN	
		Pemanfaatan teknologi informasi KUM	2017 - 2022	DINKOP & UMKM, DISDAGPERIN	
	Misi 6: Meningkatkan daya saing	Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	Pengelolaan dn pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah	2017 - 2022	DISPERTAN, DKP
			Kapasitas SDM dan kelembagaan di	2017 - 2022	DISPERTAN, DKP

daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri. Misi 7 ; meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pembangunan ekonomi daerah		sektor pertanian dan perikanan		
		Akses kredit dan teknologi untuk pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan	2017 – 2022	DISPERTAN, DKP
	Meningkatnya Investasi Daerah	Penyerderhanaan perajin usaha	2017 – 2022	DISDAGPERIN
	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata daerah	Kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku usaha kepariwisataan	2017 – 2022	DINPORAPAR
	Ketahanan energi daerah	Pemetaan dan pemanfaatan sumber energi terbarukan	2017 – 2022	BAPPEDA,DLH,DPUTR

**Tabel IV.10**

**Program – program Prioritas SIDA Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**

Misi	Sasaran	Program kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Misi 3 : Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Menurunya tingkat kemiskinan	Palayanan dasar bagi rakyat miskin	2017 - 2022	DPUTR
		Penanganan kawasan kumuh	2017 - 2022	DISPERKIM
Misi 4: meningkatkan tata kelolapemerintahan akuntabel mengutamakan pelayanan publik	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan SDM yang kompeten	Kapasitas kelembagaan dan budaya kerja pemerintah daerah	2019 - 2022	DISKOMINFO
	Penerapan <i>e-government</i> /aplikasi pemerintahan yang terintegritas	Ketetapan pemanfaatan tata ruang sesuai petunjuk	2018 - 2022	DPUTR
	Meningkatnya efektifitas pengawasan berbasis teknologi	Kapasitas kelembagaan pengawasan	2017- 2022	INSPEKTORAT

	informasi			
Misi 6 : meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri	Meningkatnya investasi Daerah	Tata ruang dan infrastruktur untuk mendukung investasi daerah	2017- 2022	DPUTR
	Berkembangnya sektor pariwisata daerah	Sarana dan prasarana kepariwisataan	2017- 2022	DPUTR
Misi 7: meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan konektivitas wilayah	Pengelolaan sumber daya air	2017- 2022	DPUTR
		Jaringan dan manajemen	2017- 2022	DPUTR,DLH
Misi 8 : meningkatnya	Menurunnya kerusakan lingkungan	Layanan sampah perkotaan	2017- 2022	DPUTR,DLH

kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan		Pencemaran dan kerusakan lingkungan	2017- 2022	DLH
		Emisi gas rumah kaca	2017- 2022	DLH
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2018- 2022	DLH
		Pengelolaan ruang terbuka hijau	2018- 2022	DLH
	Menurunnya resiko bencana	Partisipasi dan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana (desa tangguh bencana)	2017- 2022	DLH
			2017- 2022	DPUTR,DLH
Misi 8 : meningkatkan kualitas hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan	Menurunnya kerusakan lingkungan	Layanan sampah perkotaan	2017- 2022	DPUTR,DLH
		Pencemaran dan kerusakan lingkungan	2017- 2022	DLH
		Emisi gas rumah kaca	2017- 2022	DLH
		Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	2018- 2022	DLH
	Menurunnya resiko bencana	Pengelolaan ruang terbuka hijau Partisipasi dan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana	2018- 2022 2018- 2022	DLH BPBD

		(desa tangguh bencana)		
--	--	------------------------	--	--

**Tabel IV.11**

**Program – program Prioritas SIDA Bidang Inovasi dan Pengembangan Iptek**

Misi	Sasaran	Program kegiatan/tema prioritas	Tahun Pelaksanaan	Perangkat Daerah Terkait
Misi 4 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mengutamakan pelayanan publik	Meningkatkan hasil kelitbangan sebagai basis kebijakan daerah	Penguatan kapasitas kelembagaan perangkat litbang daerah	2017 - 2022	BAPPEDA
		Pengorganisasian kelitbangan daerah (majelis pertimbangan dan tim pengendali mutu)	2018 - 2022	BAPPEDA
		Penguatan jaringan kelitbangan (Dewan Riset, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang,dll)	2017 - 2022	BAPPEDA
		Kajian issue – issue strategis	2017 - 2022	BAPPEDA
		Dokumentasi dan publikasi hasil kelitbangan	2017 - 2022	BAPPEDA

		Asistensi penyusunan naskah akademik daerah	2018 - 2022	BAPPEDA
Misi 6 : meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis, perdagangan dan industri.	Meningkatkan inovasi diberbagai sektor khususnya sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah	Penguatan dan Pengembangan System Inovasi Daerah (SIDa)	2017 - 2022	BAPPEDA
		Penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	2019 - 2022	BAPPEDA
		Penguatan dan penghargaan inovasi daerah (KRENOVA, perlindungan HAKI dan IGA)	2017 - 2022	BAPPEDA
		Kewirausahaan berbasis inovasi teknologi (inkubator bisnis teknologi)	2019 - 2022	BAPPEDA

## BAB V

### FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA

Pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati mensintesa beberapa kebijakan dan kondisi yang terjadi di lapangan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pati, dengan tetap bertitik tolak pada 5 (Lima) Pilar dengan setiap Pilar terdiri dari 6 (Enam) Eleman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Lima Pilar tersebut memberikan stimulasi dari sisi penyiapan kebijakan, penguatan kelembagaan, kolaborasi antar aktor pelaksanaan inovasi daerah, pembangunan budaya inovasi dan keselarasan serta akselerasi pelaksanaan inovasi daerah nantinya. Kabupaten Pati, dengan potensi wilayah yang dimiliki mendorong Klaster Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan bidang fokus "**Pengembangan Agribisnis Dan Pariwisata**" Hal tersebut didorong guna mengeksplorasi berbagai potensi yang dimiliki pada sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Nantinya diharapkan sektor-sektor tersebut menjadi pemicu sekaligus dapat mendorong peningkatan "**Daya Saing Daerah**". Potensi wilayah tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam menumbuhkembangkan Inovasi di Daerah. Hal tersebut menjadi bahan dasar dalam mewujudkan Inovasi Daerah nantinya. Selain itu, pengelolaan Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus menggali berbagai peluang dan memperhatikan berbagai tantangan dan kondisi dalam pelaksanaan Inovasi Daerah. Pemerintah Kabupaten Pati terfokus dalam Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dengan memperhatikan dan melihat berbagai dinamika penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berujung pada peningkatan Daya Saing Daerah serta naiknya taraf hidup masyarakat. Secara kongkret Fokus dan Program prioritas Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati tertuang pada Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap capaian kinerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Tahun 2018-2022 di bawah ini.

**TABEL V.1**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH TERHADAP**  
**CAPAIAN KINERJA PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH (SIDa)**  
**TAHUN 2018 – 2022**

Kode				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah
							Kinerja	Tahun - 1	Tahun - 2	Tahun - 3	Tahun - 4	Tahun-5	Kondisi Kinerja	
				Program		Awal RPJMD	2018	2019	2020	2021	2022	Pada Akhir	Penanggung-jawab	
				Pembangunan	(Outcome)	(Tahun 0)						Periode RPJMD		
							Rp.(000)	Rp.(000)	Rp.(000)	Rp.(000)	Rp.(000)	Rp.(000)		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>2</b>	<b>03</b>			<b>Pangan</b>										
02	03	01	15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan			799,390	1,613,201	1,789,440	1,961,293	2,174,639	6,724,762	DinasKeta pang	

				Pertanian/Perkebunan	Jumlah cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	ton	pemerintah 27 masyarakat 45.6								DinasKetapang
					Persentase penanganan rawan pangan	%	68								DinasKetapang
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	50								DinasKetapang
<b>2</b>	<b>11</b>			<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									0		
2	11	01	15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Pertumbuhan Usaha Mikrobaru	%	1	75,573.25	0	0	0	0	75,573.25		DinkopUMKM

2	11	01	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Usaha Mikro yang menjadi Usaha Kecil	%	62	47,402.1	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	16,047,402.10	Dinkop UMKM
2	11	01	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Peningkatan jumlah KUB/Klaster usahamikro	%	5	88,637	325,000	410,000	479,000	547,000	1,849,637	Dinkop UMKM
					Proporsi KUB/Klaster usahamikro yang mampu menjalin kemitraan	%	7	40,392	150,000	190,000	221,000	253,000	854,392	
2	11	01	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase peningkatan manajemen koperasi	%	32	141,572	465,000	478,000	502,000	544,000	2,130,572	Dinkop UMKM

				Koperasi	Persentase koperasi yang berkinerja baik	%	1	137,884	435,119	447,570	470,081	509,964	2,000,618	
<b>3</b>	<b>02</b>			<b>Pariwisata</b>									0	
3	02	01	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata	%	25	4,250,000	1,050,000	1,046,300	1,175,000	1,288,000	8,809,300	Dinporap arKab. Pati
3	02	01	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase jumlah pengunjung destinasi pariwisata unggulan	%	14	1,341,000	10,000,000	12,500,000	15,000,000	17,500,000	56,341,000	Dinporap arKab. Pati
3	02	01	17	Program Pengembangan Kemitraan	Peningkatan jumlah kemitraan	mitra	3	140,119	328,374	364,691	404,969	449,269	1,687,422	Dinporap arKab. Pati
<b>3</b>	<b>03</b>			<b>Pertanian</b>										

3	03	01	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	0	195,000	2,950,000	3,345,000	3,679,500	4,136,228	14,305,728	Dispertan
					Persentase kelompok tani madya	%	1.27							
3	03	01	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan		%		850,170	0	0	0	0	850,170	DinasKetapang
3	03	01	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi hortikultura	%	1.00	219,000	350,000	388,237	425,522	471,809	1,854,568	Dispertan
					Pertumbuhan nilai pemasaran hasil produksi perkebunan	%	1.50							

3	03	01	18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/pe rkebunan	Persentase desa yang menerapkan teknologi pertanian	%	4.88	793,000	13,872,300	15,259,530	16,707,711	18,428,483	65,061,024	Dispertan
					Persentase kelompok tani perkebunan yang menerapkan teknologi perkebunan	%	3.19							
					Persenta sejumlah kelompok pengguna terapan teknologi pertanian/pe rkebunan	%	0.19							
3	03	01	19	Program peningkatan produksi pertanian/pe rkebunan	<i>Peningkatan produksi hasil tanaman pangan dan</i>			423,502	1,850,119	2,052,244	2,249,336	2,494,011	9,069,212	Dispertan

				<i>hortikultura</i>									
				Padi	ton	641,601							
				Jagung	ton	163,166							
				Kedelai	ton	4,734							
				Ubi Kayu	ton	699,099							
				Bawang Merah	kwinta 1	279,672							
				Cabai	kwinta 1	17,626							
				Jeruk Besar/Jeruk Pameo Bageng Taji	kwinta 1	290,186							

					<i>Peningkatan produksi hasil tanaman perkebunan</i>								
					Tebu	ton	856,137						
					Tembakau	ton	124						
					Kelapa Kopyor	butir	883,967						
					Kopi	kg	1,205,145						
					Persentase peningkatan nilai Indek Pertanaman (IP)	%	25						
					Persentase ketersediaan data pertanian	%	80					0	

					terhadap kebutuhan										
3	03	01	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/pekerkebunan lapangan	Pertumbuhan nilai prestasi kerja penyuluh pertanian	%	1.3	308,000	300,000	332,775	364,734	404,409	1,709,918	Dispertan	
3	03	01	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Rasio tenaga para medis/medis terhadap populasi ternak	rasio	0.066	405,000	500,000	554,625	607,890	674,014	2,741,529	Dispertan	
3	03	01	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan	<i>Peningkatan populasi ternak</i>			169,000	1,000,000	1,109,250	1,215,779	1,348,027	4,842,056	Dispertan	
					SapiPotong	ekor	102,071								
					Kambing	ekor	195,760								
					Itik	ekor	310,081								

				Program peningkatan	Peningkatan hasil produksi peternakan			60,000	250,000	277,312	303,944	337,006	1,228,262	Dispertan
3	03	01	23	pemasaran hasil produksi peternakan	Daging	kg	5,641,726							
					Susu	liter	235,563							
					Telur	kg	3,924,538							
3	03	01	24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Persentase kelompok ternak yang menerapkan teknologi peternakan	%	1.29	25,000	869,436	1,020,020	1,122,022	1,284,224	4,320,702	Dispertan
<b>3</b>	<b>06</b>			<b>Perdagangan</b>										
3	06	01	15	Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Pertumbuhan alat ukur yang memenuhi standar (ditera secara berkala)	%	10	528,476	650,000	721,012	790,256	876,217	3,565,961	Disdagperin

					Persentase pengaduan konsumen yang tertangani	%	10								Disdagper in
3	06	01	17	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor	Peningkatan nilai ekspor pertahun	%	20	107,000	863,558	957,899	1,049,893	1,164,097	4,142,446		Disdagper in
					Jumlah kebijakan perlindungan pasar tradisional	%	45	1,639,054	14,200,000	15,751,345	17,264,059	19,141,984	67,996,442		Disdagper in
3	06	01	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase peningkatan manajemen pasardaerah	%	10								Disdagper in
					Proporsi perdagangan berbasis e-commerce	%	10								Disdagper in

3	06	01	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan	Persentase pelanggaran pedagang kaki lima dan asongan	%	19	150,000	431,778.75	478,949.5	524,946.25	582,048.25	2,167,723	Disdagper in
<b>3</b>	<b>07</b>			<b>Perindustrian</b>									0	
3	07	01	16	Program pengembang anindustri kecil dan menengah	Persentase peningkatan industri rumah tangga menjadi industri kecil	%	6	730,000	1,000,000	1,109,250	1,215,779	1,348,027	5,403,056	Disdagper in
					Persentase peningkatan produksi industri kreatif	%	6	0	70,000	80,000	190,000	195,000	535,000	Disdagper in
3	07	01	17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Pertumbuhan produksi industri rumah tangga	%	6	90,000	350,000	388,237	425,522	471,809	1,725,568	Disdagper in

3	07	01	18	Program penataan struktur industri	Persentase peningkatan keterkaitan industri hilir-hulu	%	6	140,000	361,778.75	398,949.5	334,946.25	387,048.25	1,622,723	Disdagperin
3	07	01	19	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Persentase peningkatan industri rumah tangga berbasis e-commerce	%	6	10,000	150,000	166,387	182,366	202,203	710,956	Disdagperin
<b>4</b>	<b>01</b>			<b>Perencanaan</b>									0	
					Pertumbuhan mitra penerima publikasi produk kelitbangan	%	5	305,000	732,988	842,840	969,572	1,103,283	3,953,683	
4	01	01	28	Program Jaringan Kelitbangan	Persentase mitra yang aktif bekerjasama menghasilkan kajian	%	100							

					Index Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Ijin penelitian	Angka	85							
4	01	01	26	Program Penelitian dan Pengembang an	Persentase hasil penelitian dan pengembang an yang dijadikan bahan masukan perumusan kebijakan daerah	%	37.5	134,000	408,786	459,077	508,362	567,135	2,077,360	Bappeda
4	01	01	27	Program Pengembang an IPTEK dan Inovasi	Pertumbuha n inovasi oleh masyarakat	%	5	365,000	1,308,975	1,514,261	1,771,282	2,004,128	6,963,646	Bappeda

					Pertumbuhan inovasi oleh OPD	%	10							
3	01			Kelautan dan Perikanan									0	
3	01	01	15	Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	Pertumbuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	-5.27	75,000	300,000	416,387	507,366	577,205	1,875,958	DKP
					Produksi garam	Ton	16,868.50	Produksi garam						
3	01	01	16	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber daya	Prosentase penurunan kasus pelanggaran terhadap sumberdaya kelautan	%	-33.33	25,000	150,000	166,387	182,366	202,203	725,956	DKP

				Kelautan										
3	01	01	17	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber daya Laut	Peningkatan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan	%	8.78	50,000	150,264	170,950	196,972	229,255	797,441	DKP
3	01	01	18	Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	Luasan eksisting lahan mangrove	Ha	173.2	147,000	460,398	506,427	545,458	593,934	2,253,217	DKP
3	01	01	19	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan	Pertumbuhan produksi garam	ton	-95.56	45,000						

				Wawasan Maritim kepada Masyarakat											
3	01	01	20	Program Pengembang an Budidaya Perikanan	produksi perikanan budidaya	ton	42,036	731,500	2,500,000	2,773,124	3,039,447	3,370,068	12,414,139	DKP	
					<i>udang windu</i>			1,025							
					<i>bandeng</i>			28,360							
					<i>nila salin</i>			486							
					<i>lele</i>			10,272							

					ikan lain		1,893							
3	01	01	21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan KUB Nelayan aktif yang berbadan hukum kementerian	%	175	3,996,500	14,300,000	20,000,000	21,920,742	23,436,853	83,654,095	DKP
					Volume ikan yang dilelang di TPI	ton	27,782.00							0
3	01	01	22	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase kelompok pelaku utama perikanan madya	%	4.82	50,000	300,000	332,775	364,734	404,409	1,451,918	DKP
3	01	01	23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan	Produksi olahan ikan	ton	41,465.55	97,000	2,350,000	2,523,124	2,714,447	2,995,068	10,679,639	DKP

				Pemasaran Produksi Perikanan	Pertumbuha n pelaku usaha yang berijin usaha kelautan dan perikanan	%	0						0	
3	01	01	24	Program Pengembang an Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Ketercapaian retribusi penjualan hasil produksi BBI dan Tambak Dinas	%	63.73	225,000	2,400,000	2,662,199	2,917,869	3,235,265	11,440,333	DKP

## **BAB. VI**

### **RENCANA AKSI PENGUATAN SIDA**

Rencana Aksi Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan pelaksanaan seluruh aktivitas dari Kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Pati, sehingga merangkum berbagai masukan dan kegiatan yang saling bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang ada. Kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Aksi ini merupakan kebutuhan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dan diharapkan dapat meningkatkan Daya Saing Daerah nantinya.

Berbagai kegiatan yang tertuang dalam Rencana Aksi ini, merupakan hasil sintesa pembahasan menyeluruh dari para pemangku kepentingan. Rencana Aksi ini menekankan di beberapa aspek dan sektor yang menjadi keunggulan kompetitif Pemerintah Daerah Pati dengan segala Potensi Daerah yang dimiliki, sehingga nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Beberapa Rencana Aksi yang turut serta melibatkan Unit Kerja di luar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, diharapkan dari hal tersebut dapat menggerakkan segala sumber daya dan gagasan inovatif di Kabupaten Pati. Rencana Aksi Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pati Tahun 2018 – 2022 tersebut, dirangkai dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat dilihat dalam table VI.I di bawah ini.

Berdasarkan Fokus Program prioritas SIDA yang disusun di dalam Bab. V, maka rencana aksi berupa rincian kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun sebagaimana disajikan dalam tabel VI .1 berikut ini :

**Tabel VI.I**  
**Rencana Aksi Penguatan SIDA kabupaten Pati 2018 – 2022**

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah kebijakan			2019	2020	2021	
	Mengembangkan Infra dan suprastruktur yang mendukung bagi perkembangan kreativitas Keinovasian Daerah	Pengembangan Inkubator Bisnis	Belum ada Inkubator Bisnis	Rintisan Inkubator Bisnis	Terbentuknya Inkubator Bisnis	Terkelolanya Inkubator Bisnis	Tertatanya Inkubator Bisnis
	Menata dan mengembangkan kerangka umum yang kondusif, bagi Inovasi dan bisnis untuk daya tarik penanaman modal dan perizinan	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	Belum Ada Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	Tersusunnya naskah akademik tentang Inovasi daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah	Terlaksananya Peraturan Daerah tentang Inovasi daerah	Terkelolanya SIDA (Sistem Inovasi Daerah)
		Optimalisasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah)	Pelayanan publik belum optimal	Tertatanya sistem pelayanan publik yang mudah, cepat,	Sistem pelayanan publik yang mudah, cepat,	Sistem pelayanan publik yang mudah, cepat,	Terbangunya sistem pelayanan publik yang mudah, cepat,

				transparan prima dan akuntabel secara online	transparan, prima dan akuntabel secara online	transparan, prima dan akuntabel secara online	transparan, prima dan akuntabel secara online
--	--	--	--	--	---	---	---

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah kebijakan						
		Pengembangan data/informasi inovasi	Basis data/informasi inovasi yang mudah diakses, <i>up date dan valid</i> belum tersedia	Basis data/informasi inovatif terpetakan	Basis data/informasi inovatif mulai diintegrasikan dengan basis data daerah	Basis data/informasi inovatif terintegrasi dengan inovatif daerah	Tersedianya basis data yang mudah diakses <i>up date dan valid</i>
		Pengembangan program studi pertanian, perikanan dan pariwisata pada akdemi komunitas	Akademi Komunitas Negeri di Pati belum dilengkapi program studi: pertanian, perikanan dan pariwisata		Sekolah vokasi unggulan dibentuk pada tingkat Diploma	Sekolah vokasi unggulan dibentuk pada tingkat Diploma	Terpenuhinya Akademi Komunitas Negeri di Pati yang dilengkapi program studi pertanian, perikanan dan pariwisata
		Pengembangan infrastruktur ruang publik kreatif	Belum optimalnya penggunaan ruangan publik untuk kreavitas masyarakat	Tersusunnya rancangan ruang publik kreatif	Pembangunan ruang publik kreatif	Pembangunan ruang publik kreatif	Terbangunya Pembangunan ruang publik kreatif (RPK) sebagai sarana untuk meningkatkan kreavitas warga interaksi masyarakat

							dan memenuhi ruang terbuka hijau
	Memperkuat kelembagaan tim koordinasi penguatan SIDA dan daya dukung Iptekin dari lembaga Litbang dan Perguruan tinggi untuk memenuhi kebutuhan Iptekin	Pengembangan kelembagaan Iptekin (Kelitbangan)	Belum optimalnya kinerja kelembagaan Iptekin (Kelitbangan)	Timkor SIDA mulai melakukan koordinasi tugas dan fungsi	Laporan monev I pelaksanaan roadmap	Laporan monev II pelaksanaan roadmap	Berfungsinya kelembagaan Iptekin (Kelitbangan )
		Pengembangan Laboratorium inovasi	Inovasi belum dilaksanakan dengan optimal	Terlaksananya Bintek Laboratorium Inovasi	Terlaksananya pengembangan hasil Bintek Laboratorium Inovasi	Dilaksanakan monev hasil Bintek Inovasi	Tahapan dan pengembangan Inovasi berjalan dengan optimal

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah kebijakan						
	Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi Inovasi dan meningkatkan difusi Inovasi hasil Kelitbangan	Sosialisasi SIDA	Pemahaman mengenai SIDA masih belum optimal	Timkor SIDA mulai melakukan penyiapan sosialisasi mengenai SIDA	Pemahaman mengenai SIDA mulai disosialisasikan (25%)	Pemahaman mengenai SIDA mulai disosialisasikan (50%)	Kaidah – kaidah SIDA sudah tersosialisasikan di seluruh sektor daerah
		Revitalisasi posyantek dan wantek	Belum optimalnya peran posyantek dan wantek	Meningkatkan peran posyantek dan wantek	Percontohan dan diseminasi iptekin oleh posyantek dan wantek	Terkelolanya peran posyantek dan wantek sebagai peran agen	Berperanya posyantek dan wantek dalam mendifusikan Iptekin dan hasil litbangyasa

						diseminasi inotek	
	Mendorong budaya Inovasi dilingkungan pendidikan tinggi, vokasi dan menengah secara inklusif	Lomba Krenova dan Inovasi OPD	Belum optimal apresiasi masyarakat terhadap perlunya Inovasi	Dilaksanakannya lomba Krenova untuk umum dan Inovasi OPD	Dilaksanakannya lomba Krenova untuk umum dan Inovasi OPD	Dilaksanakannya lomba Krenova untuk umum dan Inovasi OPD	Meningkatnya apresiasi masyarakat dan OPD terhadap kegiatan Krenova masyarakat dan Inovasi OPD
	Memperkuat kerjasama antar daerah dan daerah pusat	Pengembangan kerjasama bidang ekonomi	Kerjasama antar daerah di bidang ekonomi belum ada	Penguatan SDIa sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Berjalanya Penguatan SIDA sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Meningkatnya penguatan SIDA sebagai bagian dari agenda kerjasama antar daerah	Bertambahnya kerjasama bidang ekonomi
		Pengembangan kerjasama pusat dan daerah dibidang ekonomi	Masih rendahnya jumlah kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Peta kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Rintisan kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Meningkatnya jumlah kerjasama lembaga pusat dan daerah di bidang ekonomi	Berjalanya secara optimal kerjasama antar pusat daerah masih bagi pembangunan daerah di bidang ekonomi
	Melakukan penyelarasan dengan perkembangan global terkait isu standar, HKI dan lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat tentang lingkungan hidup	Belum optimalnya peran masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam menjaga lingkungan	Meningkatnya peran masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam menjaga lingkungan	Dilaksankanya lomba pelestarian lingkungan hidup perkotaan dan pedesaan	Dilaksankanya lomba pelestarian lingkungan hidup perkotaan dan pedesaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kelestarian lingkungan
		Peningkatan kasadaran HKI	Masih rendahnya kesadaran HKI di masyarakat		Terlaksananya pelatihan HKI	Meningkatnya perlindungan HKI masyarakat	Meningkatnya kesadaran tentang HKI

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Arah kebijakan						
		Peningkatan fasilitas <i>difabel</i>	Masih kurangnya fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Tersedianya fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i> secara bertahap di ruang publik OPD	Terbitnya peraturan mengenai penyediaan fasilitas publik bagi masyarakat <i>difabel</i>	Seluruh OPD dan ruang publik menyediakan fasilitas bagi masyarakat <i>difabel</i>	Tersedianya fasilitas untuk masyarakat <i>difabel</i> diruang publik dan kantor OPD
	Mengembangkan daya saing industrial melalui pengembangan klaster industri unggulan daerah						
	Mengembangkan kebijakan dan infrastruktur klaster industri, agromina dan pariwisata untuk mendorong iklim inovasi dan bisnis yang kondusif	Pengembangan klaster industri, agromina dan pariwisata	Belum tersedia kebijakan dan infrastruktur klaster industri pariwisata	Inisiasi terbentuknya kelompok kerja dan forum klaster industri, agromina dan pariwisata	Terbentuknya kelompok kerja dan forum klaster industri, agromina dan pariwisata	Terlaksana secara terstruktur kelompok kerja dan forum klaster industri, agromina dan pariwisata	1. Terbitnya Peraturan Bupati bagi pengembangan klaster industri prioritas daerah 2. Berfungsinya kelembagaan pengelola pengembangan klaster industri agromina dan pariwisata
		Penyusunan rencana induk klaster industri, agromina dan pariwisata	Belum tersedianya rencana induk klaster industri, agromina dan	Tersusunnya Repperda	1. Tersusunnya rencana induk pengembangan klaster industri,	1. Terlaksananya rencana induk pengembangan klaster industri,	Tersusunnya rencana induk pengembangan klaster industri, agromina dan pariwisata

			pariwisata		agromina dan pariwisata 2. Implementasi Rapperda	agromina dan pariwisata 2. Implementasi Rapperda	
--	--	--	------------	--	---	---	--

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1. Peningkatan kualitas infrastruktur dan fasilitas dasar pariwisata 2. Pelatihan standar pelayanan perilaku pariwisata 3. Peningkatan kerjasama kemitraan pariwisata	Belum optimalnya infrastruktur dan standar pelayanan pariwisata serta rendahnya peran masyarakat di bidang pariwisata	1. Akses jalan ke destinasi pariwisata mulai dikerjakan 2. Fasilitas pelatihan standar pelayanan dilokasi pariwisata 3. Bertambahnya pusat informasi pariwisata 4. Adanya peran serta masyarakat di bidang pariwisata	1. Akses jalan ke destinasi pariwisata lancar 2. Standarisasi pelayanan dilokasi pariwisata 3. Peningkatan pelayanan informasi pariwisata 4. Meningkatnya peran serta masyarakat dibidang pariwisata	1. Infarstruktur lancer 2. Seluruh pelayanan dilokasi pariwisata terstandarisasi 3. Mudahnnya mendapatkan informasi pariwisata 4. Terbentuknya pokmas dan pokdarwis	1. Meningkatkan akses jalan darat dan angkutan menuju destinasi wisata pantai, goad an peninggalan sejarah 2. Tersedianya sarana dan fasilitas akomodasi wisata yang memenuhi standar fasilitas wisata domestic dan internasional 3. Tersedianya sarana kuliner, kesehatan dan sarana penunjang yang sesuai standar

							4. Optimalisasi pusat informasi dan layanan kepariwisataan 5. Adanya pokdarwis dan pokmas dikawasan wisata
		Pengembangan pelaku wisata, jaringan kerjasama dengan agen dan biro perjalanan wisata domestic dan internasional	Belum berkembangnya pelaku wisata	Dilaksanakan pendidikan dan pelatihan pelaku wisata	Meningkatnya kualitas SDM pelaku wisata	Pelaku wisata terstandarisasi	Tersedia dan berkembangnya pelaku wisata pantai, goa dan peninggalan sejarah yang handal dan profesional
		Pengembangan kawasan budidaya laut dan perairan , peningkatan produksi pertanian dan pariwisata	Belum adanya klaster industri berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiasi terbentuknya klaster industri, agromina dan pariwisata</li> <li>• Bantuan sarana produksi budidaya ikan patin</li> </ul>	Terbentuknya kelembagaan, pemetaan perilaku usaha, lingkungan dan penyusunan rencana aksi pengembangan budidaya ikan patin	Implementasi rencana aksi inisiasi pembenihan ikan aptin, pelatihan pembuatan pakan ikan	Berkembangnya aktivitas perekonomian terpadu berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
	Arah kebijakan						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

	Memperkuat kelembagaan dan daya saing dukung iptekin/litbangyasa industri, agromina dan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pasokan inovasi bagi klaster industri, agromina dan pariwisata</li> <li>2. Pengembangan pasokan inovasi bagi klaster industri, agromina dan pariwisata</li> </ol>	Masih terbatasnya informasi iptekin bagi klaster industri, agromina dan pariwisata	Pelatihan dan pendampingan ikan budidaya ikan patin	Pelatihan dan pendampingan budidaya ikan patin	Pelatihan dan pendampingan budidaya ikan patin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya pasokan iptekin (on-farm dan off-farm) di bidang industri dan budidaya ikan patin</li> <li>2. Tersedianya iptekin industri pariwisata pantai, goa dan peninggalan sejarah</li> </ol>
	Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi pengembangan klaster industri, argomina dan pariwisata	Peningkatan interaksi antar klaster dengan penghasil iptekin	Masih rendahnya interaksi pelaku klaster industri argomina dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha klaster industri, agromina dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha klaster industri, agromina dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Terlaksananya kegiatan temu usaha klaster industri, agromina dan pariwisata dengan pemasok iptekin	Optimalisasi interaksi antara para pemangku kepentingan di klaster industri agromina dan pariwisata dengan pemasok iptekin
	Meningkatkan kualitas SDM klaster industri, argomina dan pariwisata dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan SDM	Peningkatan kualitas SDM untuk budaya inovasi di klaster industri, argomina dan pariwisata	Masih rendahnya kualitas SDM dalam budidaya inovasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi usaha klaster industri, argomina dan pariwisata</li> <li>• Kegiatan gemar makan ikan</li> <li>• Lomba dan festival</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pameran hasil – hasil produk olahan argomina dan pariwisata</li> <li>• Kegiatan gemar makan ikan</li> <li>• Lomba produk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pameran hasil – hasil produk olahan argomina dan pariwisata</li> <li>• Kegiatan gemar makan ikan</li> <li>• Lomba produk</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas SDM dalam budaya inovasi di klaster industri agromina dan pariwisata</li> <li>2. Berkembangnya budaya inovasi di</li> </ol>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>produk olahan</li> <li>Studi banding pengolahan pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>olahan</li> <li>Terciptanya paket – paket wisata dalam daerah maupun lintas daerah</li> <li>Pameran, Road Show dan Tolk Show Kepariwisataaan</li> <li>Festival budaya daerah di dalam dan diluar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>olahan</li> <li>Terciptanya paket – paket wisata dalam daerah maupun lintas daerah</li> <li>Pameran, Road Show dan Talk Show Kepariwisataaan</li> <li>Festival budaya daerah di dalam dan diluar daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>klaster industri, agromina dan pariwisata dengan pemasok iptekin</li> </ul>
No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
	Arah kebijakan			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

		Peningkatan sinkronisasi hubungan klaster industri, agromina dan pariwisata	Belum adanya sinkronisasi antara pelaku bisnis di bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Terlaksananya pertemuan berkala antar pelaku usaha bidang pertanian, perikanan dan pariwisata	Sinkronisasi kepentingan dan hubungan kerja antar pelaku bisnis dan masyarakat sekitar
	Meningkatkan rantai nilai klaster industri, agromina dan pariwisata	Penguatan rantai nilai klaster industri, agromina dan pariwisata	Masih lemahnya rantai nilai klaster industri, agromina dan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan)</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha agromina</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan)</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha agromina</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha pariwisata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berkembangnya kelompok budidaya ikan (pokdakan)</li> <li>• Terbentuknya unit pakan dan obat – obatan</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha agromina</li> <li>• Berkembangnya kelompok usaha pariwisata</li> </ul>	Menguatnya rantai nilai di klaster industri, agromina dan pariwisata

No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
				2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mengembangkan daya dukung dan relevansi pengetahuan dan inovasi melalui pengembangan kawasan khusus berbasis Iptekin						
	Mempersiapkan berbagai kebijakan untuk pembangunan kawasan khusus berbasis Iptekin	Penyusunan perizinan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Belum adanya perizinan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Menyusun kebijakan tentang telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Sosialisasi telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Implementasi telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian	Tersedianya kebijakan tentang pengembangan telecenter berbasis pariwisata, perikanan dan pertanian
		Penyusunan rencana detail perencanaan pembangunan telecenter berbasis Iptekin	Belum lengkapnya dokumen perencanaan telecenter berbasis Iptekin	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Menyusun dokumen perencanaan pengembangan telecenter	Tersusunnya rencana detail telecenter berbasis Iptekin
	Memperkuat dan mengembangkan kelembagaan	Penguatan kelembagaan litbangyasa daerah	Belum dimulainya pembangunan kawasan khusus	Terbangunya kawasan khusus berbasis Iptekin	Terbangunya kawasan khusus berbasis Iptekin	Terbangunya kawasan khusus berbasis Iptekin	Menguatnya kelembagaan untuk penguatan

	Iptekin/litbangyasa dikawasan khusus berbasis Iptekin		berbasis Iptekin				Iptekin/Litbangyasa
		Peningkatan perlindungan HKI	Masih rendahnya kesadaran perlindungan HKI	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Sosialisasi dan pelatihan 2 kelompok	Meningkatnya jumlah HKI terdaftar (per 10.000 penduduk)
	Menumbuhkembangkan kerjasama dan Jaringan Inovasi di kawasan khusus berbasis Iptekin	Pengembangan kelembagaan pengelola telecenter berbasis Iptekin	Belum tersedianya kelembagaan pengelola telecenter berbasis Iptekin	Penguatan SDM kelembagaan telecenter	Penguatan hardware dan software	Penguatan konten	Terbentuknya lembaga pengola telecenter berbasis Iptekin
No	Strategi	Kegiatan	Kondisi SIDA Saat Ini	Target Capaian Setiap tahun			Kondisi SIDA yang Akan Dicapai
	Arah kebijakan			2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Optimalisasi pemanfaatan pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau <i>Broad and learning center (BLC)</i>	Belum optimalnya pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau <i>Broad and learning center (BLC)</i>	Sosialisasi pendampingan dan pelatihan	Sosialisasi pendampingan dan pelatihan	Sosialisasi pendampingan dan pelatihan	Optimalnya pemanfaatan pusat belajar masyarakat berupa telecenter atau <i>Broad and learning center (BLC)</i>
	Mendorong budaya Inovasi di kawasan khusus berbasis Iptekin	Pengembangan Jaringan Iptekin dikawasan khusus	Belum terbangunnya Jaringan Iptekin di	Adanya 2 jaringan Iptekin	Adanya 2 jaringan Iptekin	Adanya 2 jaringan Iptekin	Berkembangnya budaya berjejaring antara aktor inovasi Iptekin

			kawasan khusus				dikawasan khusus
	Membangun jaringan kerjasama di kawasan khusus berbasis Iptekin dengan kawasan serupa	Pengembangan jaringan kerjasama asosiasi nasional dan internasional	Belum masuknya pati sebagai kawasan khusus berbasis Iptekin dan anggota asosiasi	Jaringan Iptekin dengan kawasan	Jaringan Iptekin dengan kawasan	Jaringan Iptekin dengan kawasan	Masuknya pacitan sebagai kawasan industri berbasis Iptekin dan anggota asosiasi Nasional
		Perencanaan kerjasama	Belum adanya jaringan dan kerjasama Nasional kawasan khusus berbasis Iptekin	Adanya MoU dengan pusat – pusat telecenter provinsi	Adanya MoU dengan pusat – pusat telecenter Nasional	Adanya MoU dengan pusat – pusat telecenter Nasional	Terbangunya kerjasama dengan pusat unggulan Nasional
	Membangun kerjasama internasional di kawasan khusus berbasis Iptekin	Perencanaan kerjasama	Belum adanya jaringan dan kerjasama Nasional kawasan khusus berbasis Iptekin	Inisiasi kerjasam telecenter Nasional	Inisiasi kerjasam telecenter Nasional	Inisiasi kerjasam telecenter Nasional	Terbangunya jaringan dan kerjasama Nasional kawasan khusus berbasis Iptekin
	Mendorong perkembangan usaha Inovatif dan memperkuat kelembagaan pendukungnya						

